



RKPD 2019



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019



**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, maka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 66);
 26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
- b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

- b. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 05 Juli 2018

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 16

Mengesahkan
Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya
a.n. BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

Hj. LUCIANA RINA DAMAYANTI, S.IP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 5
1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I – 5
1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD Tahun 2019.....	I – 6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I – 7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I – 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II – 1
2.1.1. Aspek Geografis & Demografi.....	II – 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 11
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 26
2.1.4. Aspek Potensi Daerah.....	II – 60
2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	II – 67
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 76
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi.....	III – 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III – 6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 8
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III – 9
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 11
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 15
3.2.4. Ringkasan Keuangan Daerah.....	III – 16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	IV
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV – 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	IV – 16

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V
	5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah	V – 1
	5.2. Kerangka Pendanaan	V – 15
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..	VI
BAB VII	PENUTUP	VII
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017	II – 10
Tabel 2. 2	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017	II – 11
Tabel 2. 3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	II – 13
Tabel 2. 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	II – 14
Tabel 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 19
Tabel 2. 6	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 ..	II – 22
Tabel 2. 7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013- 2017.....	II – 22
Tabel 2. 8	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 25
Tabel 2. 9	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 ..	II – 26
Tabel 2. 10	Perkembangan Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 27
Tabel 2. 11	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 28
Tabel 2. 12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/S1 Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 28
Tabel 2. 13	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017	II – 29
Tabel 2. 14	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk.	II – 29
Tabel 2. 15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.....	II – 30
Tabel 2. 16	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	II – 30
Tabel 2. 17	Penyandang Difabel Menurut Kecamatan dan Jenis Berdasarkan Basis Data Terpadu.....	II – 33
Tabel 2. 18	Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 34
Tabel 2. 19	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 35
Tabel 2. 20	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 36
Tabel 2. 21	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2017	II – 36
Tabel 2. 22	Skor Pola Pangan (PPH) Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013-2017	II – 37
Tabel 2. 23	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 38
Tabel 2. 24	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017... ..	II – 39
Tabel 2. 25	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.	II – 40
Tabel 2. 26	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II – 41

Tabel 2. 27	Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017	II – 42
Tabel 2. 28	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 45
Tabel 2. 29	Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 45
Tabel 2. 30	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten 2013-2017.....	II – 46
Tabel 2. 31	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 46
Tabel 2. 32	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 47
Tabel 2. 33	Perkembangan Jumlah Koleksi dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 47
Tabel 2. 34	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017... ..	II – 48
Tabel 2. 35	Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (ton).....	II – 48
Tabel 2. 36	Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten	II – 49
Tabel 2. 37	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II – 50
Tabel 2. 38	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dlm satuan Ha)	II – 52
Tabel 2. 39	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Ha)	II – 53
Tabel 2. 40	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten	II – 55
Tabel 2. 41	Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 56
Tabel 2. 42	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2012-2017	II – 59
Tabel 2. 43	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2013-2017 (dlm %).	II – 60
Tabel 2. 44	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2013-2017.....	II – 61
Tabel 2. 45	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dlm satuan Ha)	II – 61
Tabel 2. 46	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II – 62
Tabel 2. 47	KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2017	II – 63
Tabel 2. 48	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II – 63
Tabel 2. 49	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Km)	II – 64
Tabel 2. 50	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dlm Km).....	II – 65
Tabel 2. 51	Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten.....	II – 65
Tabel 2. 52	Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II – 66
Tabel 2. 53	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017	II – 67
Tabel 2. 54	Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2017	II – 72
Tabel 2. 55	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis dan Pemecahannya.....	II – 95
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017	III – 5

Tabel 3.2	Perkembangan Indikator dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018.....	III – 7
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2019	III – 10
Tabel 3.4	Prosentase Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 dan Proyeksi 2019.	III – 10
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2019	III – 13
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2019	III – 15
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2019	III – 16
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	IV – 8
Tabel 4.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019.	IV – 28
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Rencana Kerja Tahun 2019.....	V – 15
Tabel 6.1	Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019	VI – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019..	I – 2
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten	II – 1
Gambar 2. 2	Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten.....	II – 9
Gambar 2. 3	Perkembangan Jumlah KK Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 11
Gambar 2. 4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 12
Gambar 2. 5	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	II – 15
Gambar 2. 6	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	II – 16
Gambar 2. 7	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 17
Gambar 2. 8	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II – 18
Gambar 2. 9	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017.....	II – 18
Gambar 2. 10	Jumlah Perkara dan Terdakwa di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 19
Gambar 2. 11	Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2017.....	II – 20
Gambar 2. 12	Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	II – 21
Gambar 2. 13	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 23
Gambar 2. 14	Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 24
Gambar 2. 15	Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 24
Gambar 2. 16	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016	II – 25
Gambar 2. 17	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 26
Gambar 2. 18	Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 27
Gambar 2. 19	Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pasien pada satuan waktu tertentu)	II – 30
Gambar 2. 20	Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 32
Gambar 2. 21	PMKS yang Memperoleh Bantuan.....	II – 32
Gambar 2. 22	Perkembangan UMK di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 35
Gambar 2. 23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II – 35
Gambar 2. 24	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II – 36
Gambar 2. 25	Prosentase Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 40
Gambar 2. 26	Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 41
Gambar 2. 27	Trend Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013-2017.....	II – 45

Gambar 2. 28	Perkembangan Pengunjung Obyek Wisata Tahun 2013-2017	II – 51
Gambar 2. 29	Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 55
Gambar 2. 30	Perkembangan Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012-2016	II – 57
Gambar 2. 31	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017.....	II – 59
Gambar 2. 32	Peringkat Kinerja Progresif.....	II – 70
Gambar 2. 33	Peringkat Kinerja Represif.....	II – 71
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Tahun 2013-2017	III – 4

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN
2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

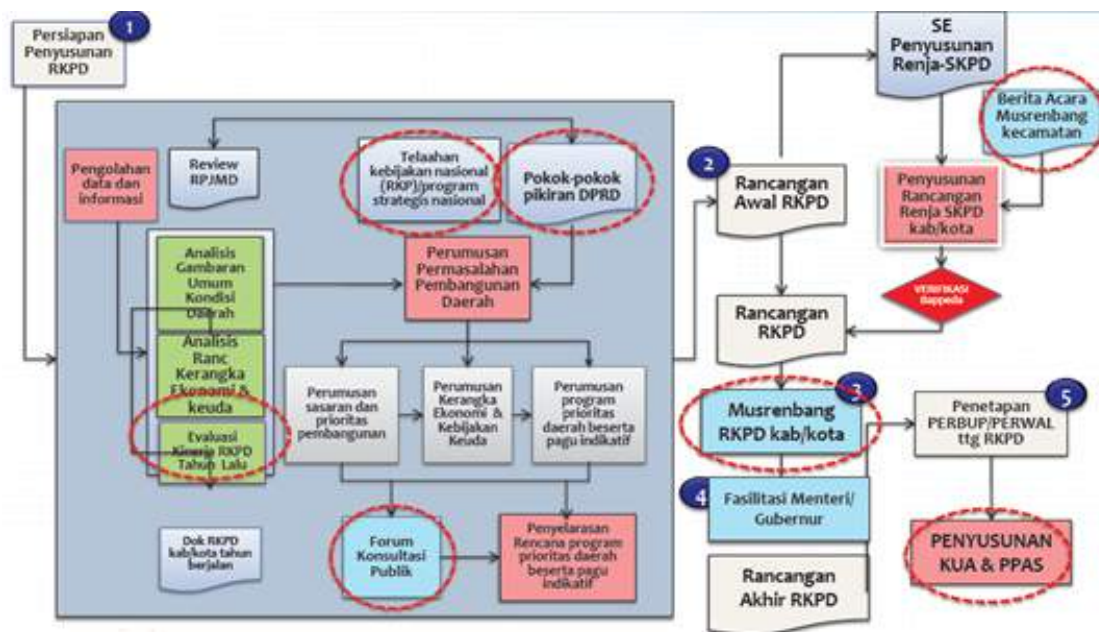
Pasal 75 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa RKPD Kabupaten/Kota disusun *berpedoman* pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, dan program strategis nasional.

Berpijak pada regulasi tersebut di atas, makna dari berpedoman pada RPJMD adalah terkait penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota. Berpedoman pada RKPD Provinsi dikandung maksud penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional adalah penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

RKPD Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kewajiban daerah, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD Tahun 2019

ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu : teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjangkaran aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Alur penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Konsekuensi dari pelaksanaan pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Tahun 2019 merupakan integrasi antara program-program pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) maupun swasta/masyarakat sebagai hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Peraturan tersebut mengarahkan pada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah secara jelas diatur ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan rencana perangkat daerah di antaranya: 1). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Seluruh dokumen perencanaan tersebut harus dilakukan sinkronisasi dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergitas, keterkaitan, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan juga harus dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diupayakan terwujudnya hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD dengan RPJPD, dan RPJMD

Dokumen RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan **tahap ketiga (Tahun 2015-2020) dalam RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025** yang diselaraskan dengan visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

3. Hubungan RKPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, agar terjadi sinkronisasi dan berkesinambungan dalam hal : tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun Keempat RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih spesifik dengan indikator dan target kinerja yang terukur baik di tingkat Kabupaten maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Dengan demikian diharapkan rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang ditetapkan dan juga dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019;
- b. Mewujudkan sinergitas pembangunan daerah antar tingkat pemerintahan (Daerah, Provinsi dan Pusat);
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Menyediakan kerangka logis bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. Menyediakan kerangka formal dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Berpedoman Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RJPMD;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan target indikator kinerja daerah sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19" Lintang Selatan sampai 7°48`33" Lintang Selatan dan antara 110°26`14" Bujur Timur sampai 110°47`51" Bujur Timur.

2.1.1.1. Letak Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY);
dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Klaten**

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Dari segi klimatologis Kabupaten Klaten memiliki sifat iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang

tahun. Temperatur udara berkisar antara 28 – 30 C^o, sedangkan temperatur bulanan rata-rata berkisar antara 25,42 – 26,70 C^o. kecepatan angin rata-rata 20 – 25 Km/jam, kelembaban relatif bulanan rata-rata berkisar antara 75,20 – 85,60 mm. Hg. Kemudian penguapan bulanan rata-rata berkisar antara 1,97 – 3,37 % dan lama penyinaran matahari bulanan rata-rata berkisar antara 44,20 – 70,00% dari 6 jam penyinaran.

Curah hujan di Kabupaten Klaten selama tahun 2016 sebesar 1.416,96 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juli 2016 sebesar 155,66 mm dan yang terendah terjadi pada bulan April, 2016 sebesar 0.91 mm. Kecamatan dengan curah hujan tinggi meliputi : Cawas, Trucuk, Manisrenggo, Prambanan dan Klaten Utara.

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan berdasar jenis tanah, yaitu :

1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

2. Regosol Kelabu :

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. Regosol Coklat Kekelabuan :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi

air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013-2017 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.116 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.111 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.066 Ha pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menjadi 33.022 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2014 seluas 54,1504 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,4893 Ha, Industri 13,6611 Ha. Sedangkan pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,8997 Ha, dan Industri 13,6631 Ha. Kemudian tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,392 Ha, dengan perincian peruntukan : Perumahan 33,058 Ha, Industri 8,910 Ha, Perusahaan 0,113 Ha dan Jasa 3,311 Ha. Untuk tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,761 Ha, dengan perincian peruntukan : Perumahan 40,298 Ha, Industri 4,515 Ha dan Jasa 0,948 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian maupun agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah bahkan nasional. Selanjutnya untuk meningkatkan tatakelola penggunaan lahan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai potensi wilayah yang diselaraskan dengan tata ruang wilayah.

2.1.1.7. Pengembangan Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang dibagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu:

- A. KAWASAN LINDUNG, terdiri atas:
1. Kawasan Hutan Lindung, mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, berupa kawasan resapan air yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
 3. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri atas:
 - a. sempadan sungai, kawasan ini memiliki luas kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - 2) dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - 3) dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan ini berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat; dan
 - c. kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, kawasan ini memiliki luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan yang memiliki luasan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.
 4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, yang terdiri atas (a) Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan (b) Kawasan cagar budaya, meliputi (1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar; (2) Candi

Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan (3) Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam,

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor, antara lain Kecamatan Bayat; Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi.
- b. Kawasan rawan bencana alam banjir, antara lain Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, PRambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari:
- c. Kawasan rawan bencana angin topan dapat dilihat pada mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

6. Kawasan Lindung Geologi yang terdiri dari:

- a. kawasan cagar alam geologi, kawasan ini berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat,
- b. kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan ini terdiri dari kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi. Kawasan rawan letusan gunung berapi berupa kawasan rawan bencana letusan Gunung merapi yang meliputi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, dan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I. Kawasan Rawan Gempa Bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur patahan aktif.
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kawasan ini berupa daerah imbuhan air tanah yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
- d. kawasan sekitar mata air, kawasan ini berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar.

7. Kawasan Lindung Lainnya, kawasan ini berupa kawasan perlindungan plasma nutfah daratan di wilayah Kabupaten.

B. KAWASAN BUDIDAYA, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; yang terdiri atas :
 - a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - b. Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi kecamatan Bayat dan Kalikotes.
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat; dengan luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi Kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.
3. Kawasan Peruntukan Pertanian; dengan luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kawasan Peruntukan Hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas kelapa deres, kapuk, kopi, tembakau rajangan dan asepan, tembakau virginia, tembaga vorstendland, cengkeh dan tebu.
 - c. Kawasan Peruntukan Peternakan diantaranya: penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar yang tersebar disemua kecamatan.
 - d. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

4. Kawasan Peruntukan Perikanan; yang terbagi atas :
 - a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap, yang tersebar di seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya, yang meliputi (1) Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat; dan (2) Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan: Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
 - c. Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi kecamatan: Karanganom, Polanharjo, Tulung , Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum.
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan; yang diperuntukkan pertambangan terdiri atas mineral (andesit, batu gamping, lempung alluvial, batuan) serta minyak dan gas bumi, yang terbagi dalam :
6. Kawasan Peruntukan Industri; yang terbagi dalam :
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Besar, yang tersebar di (1) Kecamatan Ceper seluas ± 342 ha; hektar; (2) Kecamatan Pedan seluas ± 147 ha; dan (3) Kecamatan Prambanan seluas ± 127 ha.
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Menengah, yang tersebar di Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Karanganom, Delanggu dan Jogonalan dengan luas kurang lebih ± 200 ha;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Mikro, yang meliputi : Industri pengecoran logam, pandai besi, tenun bukan mesin, konveksi, genteng, meubeleur/furniture, gerabah/keramik, pengolahan tembakau, mie soon, makanan kecil dan tatah sungging.
 - d. Kawasan Peruntukan Pariwisata; yang terbagi kedalam kawasan pariwisata budaya dan alam serta buatan.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman, yang terbagi ke dalam :
 - a. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus

delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.

- b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
- c. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan, antara lain : Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur); Komando Distrik Militer (Kodim); Kepolisian Resor (Polres) Klaten; Lapangan Tembak; Komando Rayon Militer (Koramil); dan Kepolisian Sektor (Polsek).

Peta pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2.
Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten

2.1.1.8. Kondisi Demografi Daerah

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2013 sebanyak 1.246.944 jiwa, naik menjadi sebanyak 1.308.712 jiwa pada tahun

2017, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,22% dan kepadatan penduduk 19.963 jiwa/km². Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.1

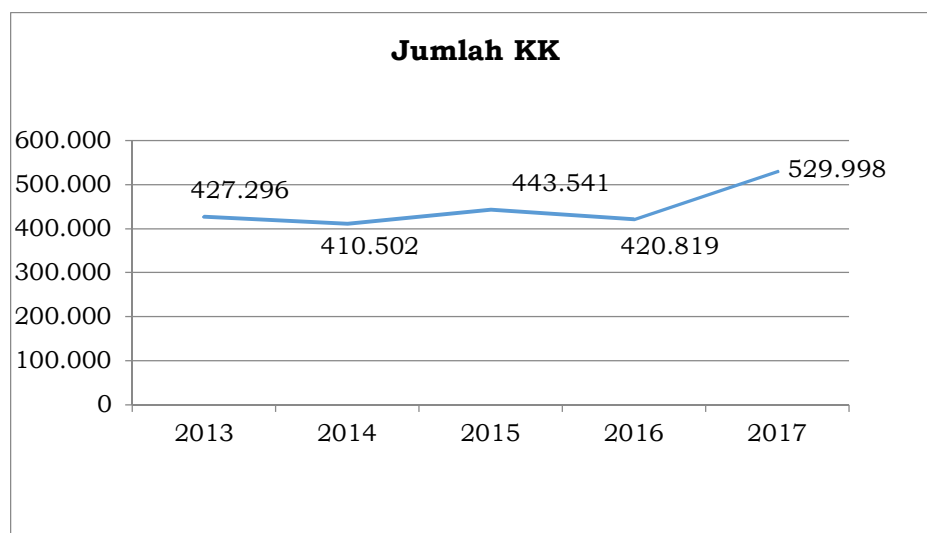
Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		2013	2014	2015	2016	2017			
1	Prambanan	49,539	50,065	54,588	51,861	52,112	251	0,48%	2,133
2	Gantiwarno	41,472	40,309	45,226	40,618	41,060	442	1,09%	1,601
3	Wedi	54,174	53,499	58,714	53,673	54,068	395	0,74%	2,218
4	Bayat	60,960	62,649	68,951	64,399	64,680	281	0,44%	1,640
5	Cawas	58,059	57,736	63,657	60,509	60,047	-462	-0,76%	1,742
6	Trucuk	76,829	76,021	82,369	79,930	79,409	-521	-0,65%	2,349
7	Kebonarum	20,418	20,336	22,123	20,833	20,532	-301	-1,44%	2,123
8	Jogonalan	57,358	58,220	63,634	59,725	59,808	83	0,14%	2,240
9	Manisrenggo	40,400	41,372	45,189	43,521	43,245	-276	-0,63%	1,604
10	Karangongko	34,962	35,582	39,258	37,613	37,371	-242	-0,64%	1,398
11	Ceper	62,911	64,450	70,003	65,587	66,196	609	0,93%	2,709
12	Pedan	45,946	46,963	51,162	48,235	48,592	357	0,74%	2,535
13	Karangdowo	43,938	44,022	48,770	45,617	46,144	527	1,16%	1,579
14	Juwiring	57,984	58,489	57,140	60,211	60,953	742	1,23%	2,046
15	Wonosari	61,714	61,991	58,374	64,846	64,494	-352	-0,54%	2,071
16	Delanggu	42,374	42,918	41,012	43,354	43,917	563	1,30%	2,340
17	Polanharjo	41,461	41,813	40,386	42,551	42,886	335	0,79%	1,799
18	Karanganom	44,937	45,210	43,134	47,111	47,102	-9	-0,02%	1,958
19	Tulung	51,905	52,286	49,655	54,401	55,386	985	1,81%	1,731
20	Jatinom	55,984	57,462	53,566	60,262	61,475	1213	2,10%	1,730
21	Kemalang	35,155	37,283	34,871	38,502	39,467	965	2,51%	764
22	Ngawen	44,867	45,428	42,491	46,039	46,697	658	1,43%	1,314
23	Kalikotes	35,466	35,625	33,938	37,465	37,877	412	1,10%	2,748
24	Klaten Utara	44,476	46,180	44,197	47,462	48,315	853	1,80%	2,918
25	Klaten Tengah	40,505	41,778	39,158	41,907	42,361	454	1,08%	4,655
26	Klaten Selatan	43,150	43,919	40,447	44,474	44,518	44	0,10%	4,749
	JUMLAH	1,246,944	1,261,606	1,292,013	1,300,706	1,308,712	8.006	0,62%	1,996

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018

Berdasar Tabel 2.1 Pertumbuhan penduduk di semua Kecamatan mengalami penurunan atau minus. Hal ini berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa diketemukan adanya data ganda dan data tidak normal, sehingga setelah dibersihkan/validasi administrasi kependudukan oleh pusat maka jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dari semula 1.300.706 jiwa pada tahun 2016 menjadi 1.308.712 jiwa pada tahun 2017.

Ada peningkatan jumlah KK yang semula sejumlah 420.819 KK pada tahun 2016 menjadi 529.998 KK pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3.
Perkembangan Jumlah KK Kabupaten Klaten
Tahun 2013-2017

Mayoritas pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Klaten mengalami pengurangan, hal ini disebabkan diantaranya validasi administrasi kependudukan dengan diterapkannya KTP-Elektronik sistem penunggalan data, angka mutasi kependudukan dan angka kematian. Jumlah penduduk tersebut mengakibatkan pergeseran rasio beban tanggungan sebagaimana terjabar dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Prosentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2014	244,405	873,197	144,004	1,261,606	44.48%
2	2015	251,429	893,111	147,474	1,292,013	44.66%
3	2016	252,057	900,182	148,466	1,300,706	44.49%
4	2017	253,939	905,393	149,380	1,308,712	44.55%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

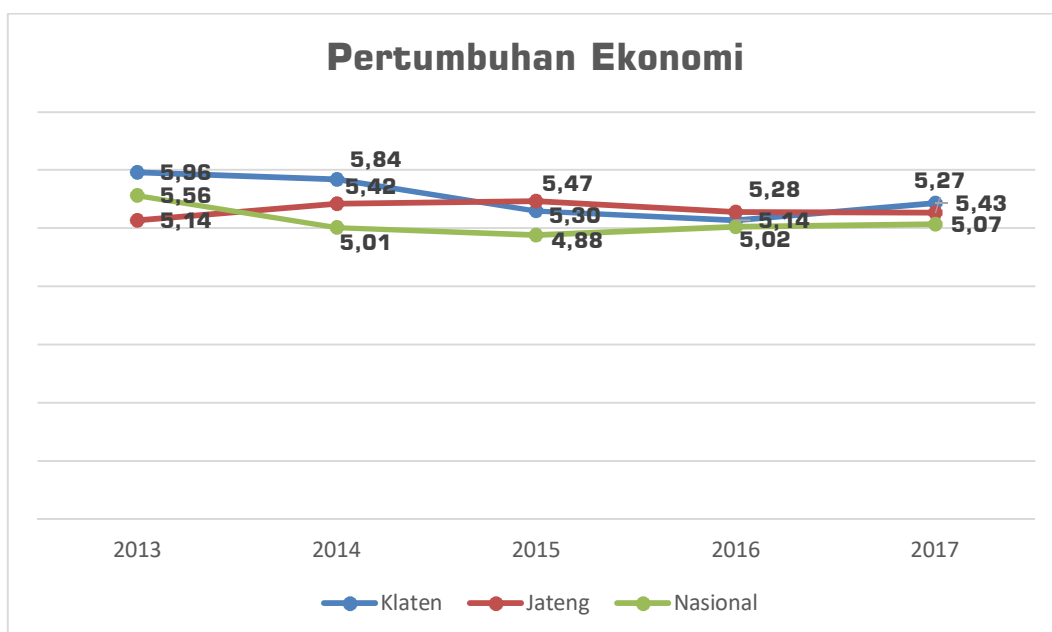
Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama.

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2013 -2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2013 tumbuh 5,96%, dan tahun 2014 menurun menjadi sebesar 5,84%, pada tahun 2015 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,30%)



sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 5,14%, dan tahun 2017 diperkirakan tumbuh berkisar sebesar 5,43%. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013 - 2017, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Gambar 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 yang dari tahun ke tahun tumbuh secara positif. Beberapa sektor lapangan usaha mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami tren kenaikan yang baik. Jabaran selengkapnya pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah dan Persentase Kenaikan)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,583,620.33	4.56	2,606,035.81	0.87	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99	2,904,968.43	3.23
2	Pertambangan dan Penggalian	557,451.35	6.45	597,551.15	7.19	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89	655,048.62	3.12
3	Industri Pengolahan	6,506,551.46	8.60	7,093,268.56	9.02	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10	8,512,688.47	6.39
4	Pengadaan Listrik dan gas	37,301.57	7.98	38,526.20	3.28	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20	44,285.67	6.49
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,062.16	3.46	11,527.87	4.21	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16	12,329.79	2.34
6	Konstruksi	1,254,970.42	4.65	1,294,690.29	3.17	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87	1,524,516.17	6.17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,000,471.06	2.24	4,094,285.55	2.35	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55	4,524,466.66	3.81
8	Transportasi dan Pergudangan	469,346.14	10.63	515,457.41	9.82	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07	591,419.85	4.35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755,159.55	2.91	792,087.87	4.89	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06	939,352.83	6.35
10	Informasi dan Komunikasi	749,129.31	3.72	794,978.71	6.12	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51	978,651.68	7.76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,611.17	5.94	718,614.58	6.37	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25	885,144.74	7.51
12	Real Estate	290,530.05	6.80	316,062.61	8.79	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17	384,178.64	6.46%
13	Jasa Perusahaan	60,535.96	18.84	65,626.24	8.41	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19	84,732.87	9.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543,501.77	2.39	546,822.57	0.61	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96	610,742.42	3.19
15	Jasa Pendidikan	1,193,988.37	10.03	1,333,544.38	11.69	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61	1,608,872.35	5.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200,873.15	9.90	224,011.39	11.52	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80	280,985.79	8.04
17	Jasa Lainnya	351,325.20	10.03	381,431.17	8.57	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96	463,430.04	8.20
Produk Domestik Regional Bruto		20,241,429.02	5.96	21,424,522.36	5.84	22,558,976.13	5.30	23,717,931.01	5.14	25,055,815.01	5.43

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

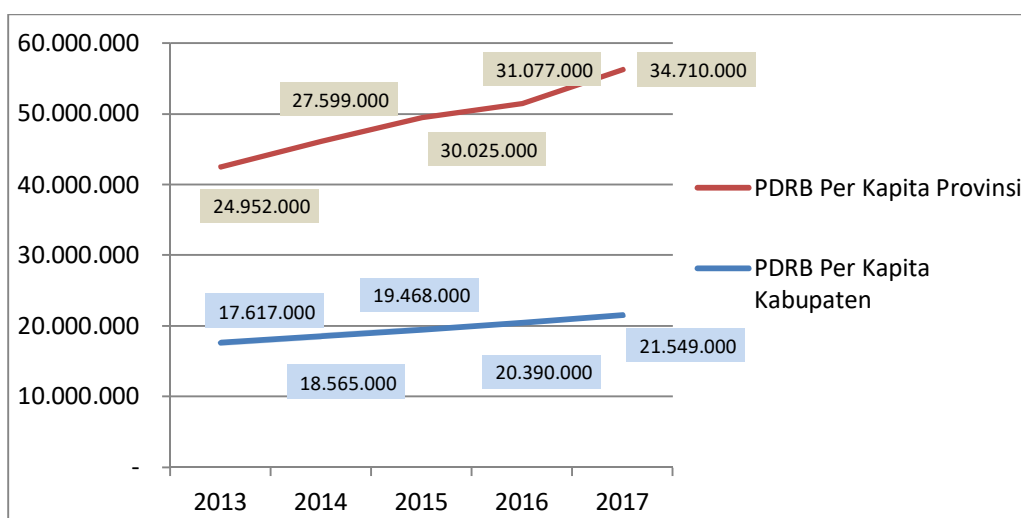
Tabel 2.4.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah dan Persentase Kenaikan)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017*)	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,095,353.37	9.76	3,284,129.30	6.10	3,622,347.95	10.30	3,807,648.99	12.07	4,055,072.63	12.85
2	Pertambangan dan Penggalian	662,226.32	10.10	809,207.55	22.20	955,364.63	18.06	1,013,913.84	3.21	1,092,091.81	3.46
3	Industri Pengolahan	7,693,350.45	10.48	9,116,653.82	18.50	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	35.94	12,896,688.66	40.87
4	Pengadaan Listrik dan gas	34,673.28	2.70	36,912.08	6.46	39,661.13	7.45	45,832.98	0.15	54,073.96	0.17
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,394.65	5.23	12,097.70	6.17	12,698.33	4.96	13,246.78	0.04	13,979.10	0.04
6	Konstruksi	1,417,692.47	8.44	1,604,879.56	13.20	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	6.07	2,094,407.05	6.64
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,362,830.00	5.42	4,609,167.50	5.65	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	16.76	5,747,471.72	18.21
8	Transportasi dan Pergudangan	483,145.12	11.98	557,513.39	15.69	614,745.60	10.27	645,983.06	2.05	687,692.95	2.18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	803,221.78	3.38	878,161.00	9.33	974,845.99	11.01	1,091,004.92	3.46	1,246,106.40	3.95
10	Informasi dan Komunikasi	795,566.85	5.76	836,098.10	5.09	880,528.28	5.31	948,513.65	3.01	1,039,291.27	3.29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	801,037.09	10.64	888,874.29	10.97	985,803.41	10.90	1,084,247.12	3.44	1,215,694.31	3.85
12	Real Estate	298,881.50	8.44	343,172.57	14.82	381,078.74	11.05	409,138.03	1.30	446,604.26	1.42
13	Jasa Perusahaan	71,050.05	26.22	79,657.41	12.11	90,459.78	13.56	102,385.38	0.32	118,309.07	0.37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626,029.07	5.67	668,437.00	6.77	730,951.96	9.35	790,819.46	2.51	870,757.68	2.76
15	Jasa Pendidikan	1,548,658.63	18.06	1,805,978.48	16.62	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	6.84	2,392,704.60	7.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	262,302.13	19.20	303,146.41	15.57	339,329.96	11.94	371,819.69	1.18	415,201.68	1.32
17	Jasa Lainnya	377,737.09	13.87	436,804.15	15.64	470,679.24	7.76	527,780.71	1.67	604,025.58	1.91
Produk Domestik Regional Bruto		23,345,149.85	9.35	26,270,890.31	12.53	28,988,778.55	10.35	31,558,691.07	8.87	34,990,172.73	10.87

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

2.1.2.2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah yang dihitung berdasarkan analisa produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di bagi jumlah penduduk wilayah tersebut. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 sebesar 17,62 juta, pada tahun 2014 sebesar 18,56 juta, pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 19,47 juta, pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 20,39 juta, dan pada tahun 2017 diprediksikan naik menjadi sebesar 21,23 Juta. Gambaran selengkapnya Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



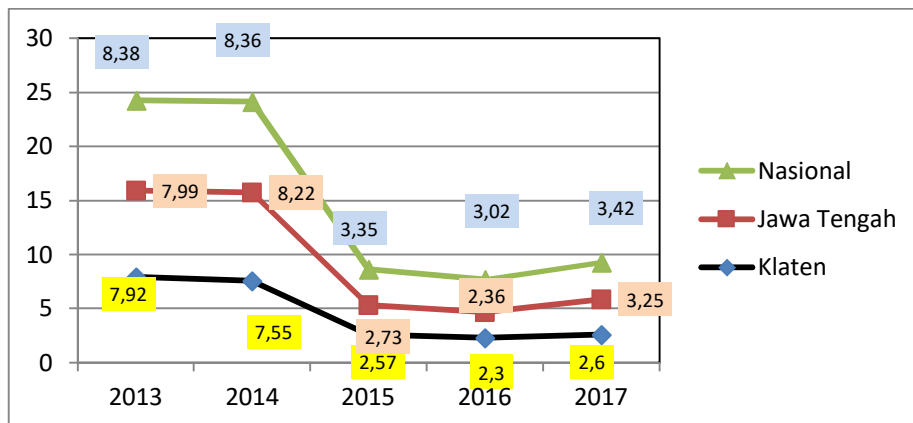
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2016, (diolah)

Gambar 2.5.
Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2.1.2.3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun dari tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2012 sebesar 1,66%, atau lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar 0,27%. Fluktuasi Inflasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti adanya fluktuasi harga komoditas pangan maupun harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat juga sangat berpengaruh

terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflansi di Kabupaten Klaten selama tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016.

Gambar 2.6.

Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.5 di atas, laju inflansi selama tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflansi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflansi nasional maupun provinsi. Inflansi pada tahun 2013 sebesar 7,92% dapat disampaikan cukup stabil. Untuk inflansi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,55% dan dilihat dari komponen pembentuknya, kenaikan inflansi pada tahun 2014 disebabkan oleh perubahan musim yang berpengaruh pada kenaikan harga barang terutama bahan pangan strategis seperti beras, jagung dan bawang, maupun cabe.

Selanjutnya untuk inflansi pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,57% untuk tahun 2015 dan sebesar 2,30% untuk tahun 2016. Penurunan ini utamanya dipicu oleh stabilnya harga pangan beberapa komoditas utama dan naiknya daya beli masyarakat, meskipun ada sedikit kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar 41-42 Listrik (TDL).

Mengingat BBM dan TDL sebagai faktor produksi utama, maka secara langsung menyebabkan perubahan harga barang-barang strategis yang sangat mempengaruhi laju inflansi. Sedangkan untuk tahun 2017 inflansi di Kabupaten Klaten sebesar 2,60% disebabkan oleh masih terkendalinya harga beberapa komoditas

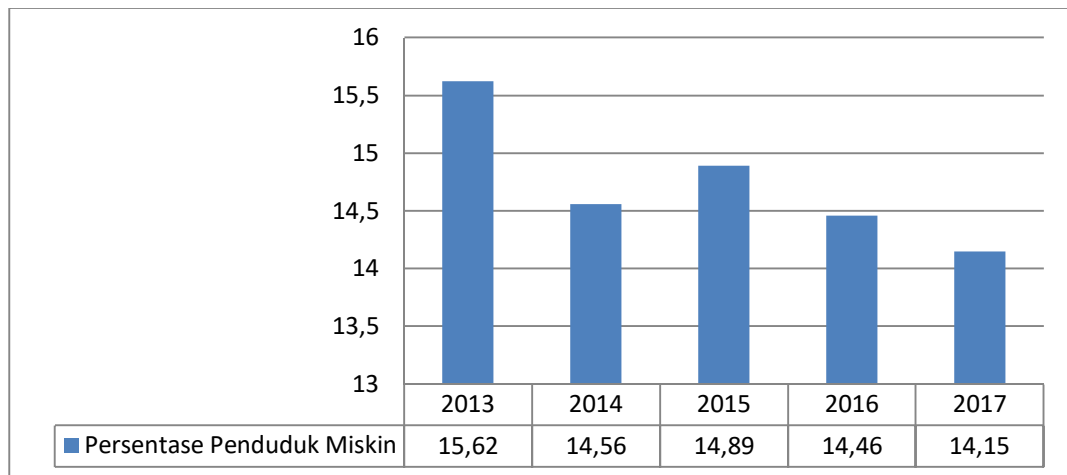
pangan utama dan berjalannya fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

2.1.2.4. Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kabupaten Klaten merupakan gambaran dari kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

A. Persentase Penduduk Miskin

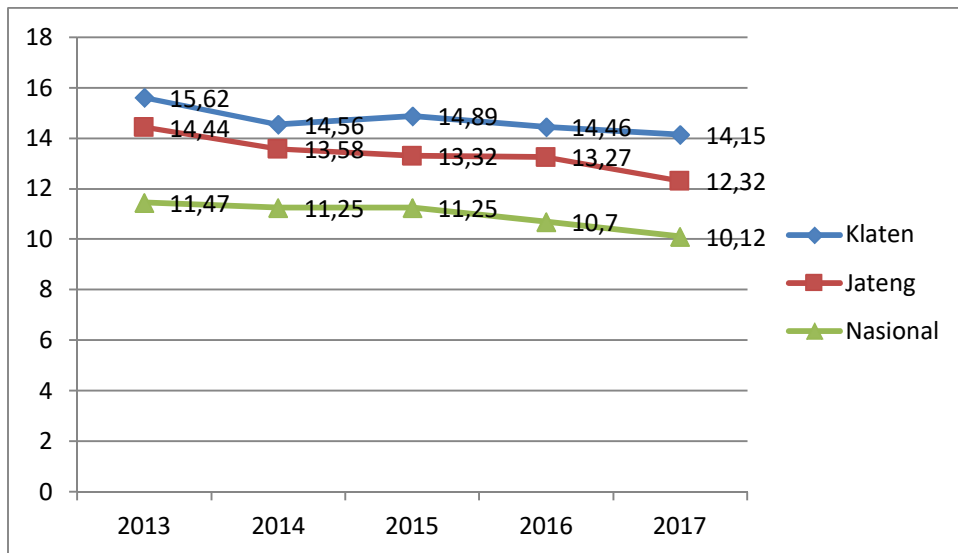
Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.7.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten tahun 2013-2017

Pada Gambar 2.6. ditunjukkan perkembangannya persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 15,62% pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 14,15% pada tahun 2017 atau turun sebesar 1,47% selama 4 (empat) tahun terakhir. Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.8.

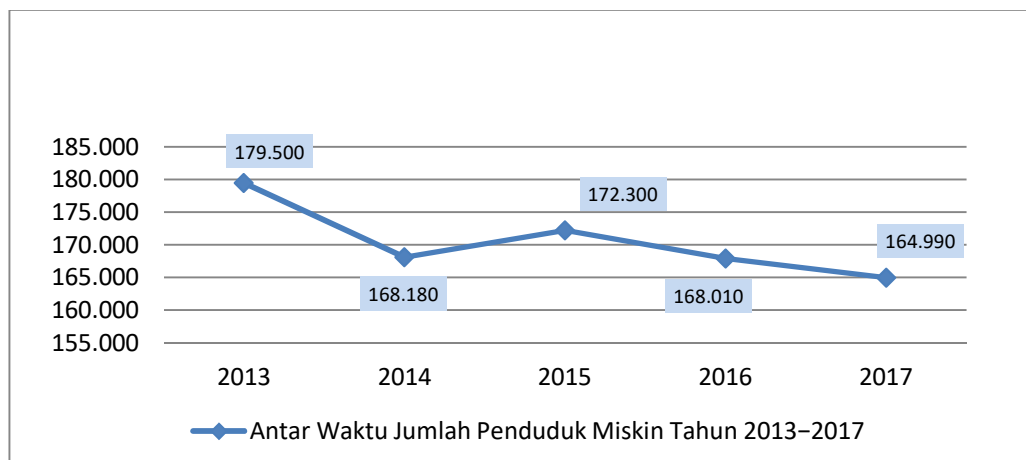


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.8.
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

B. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



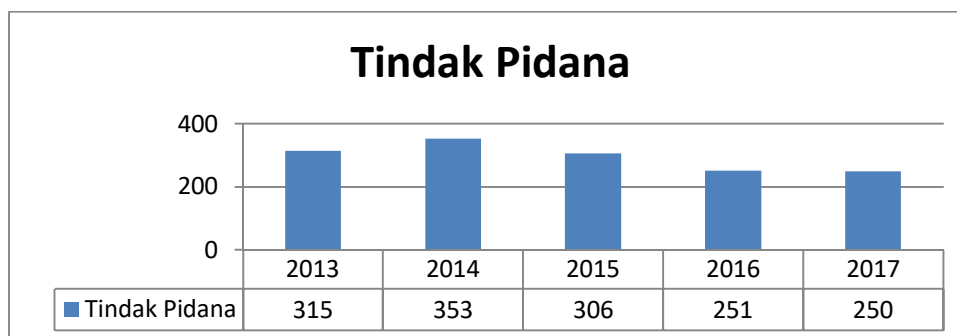
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.9.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017

Pada Gambar 2.9. ditunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif). Tahun 2013 terdapat sebanyak 179.500 jiwa dan terus mengalami penurunan menjadi sebanyak 164.990 jiwa pada tahun 2017. Dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun telah terjadi pengurangan sebanyak 14.510 jiwa.

2.1.2.5. Jumlah Tindak Pidana

Kondisi jumlah tindak pidana di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif, dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan yang terjadi karena meningkatnya kesadaran hukum. Jumlah tindak pidana pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.10.
Jumlah Perkara dan Terdakwa di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten telah menunjukkan capaian yang baik. Salah satu indikator pengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 4 (empat) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat (diukur dengan Angka/Usia Harapan Hidup ketika lahir), (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Angka Melek Huruf (*literacy rate*) dan Rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (*mean years of schooling*), dan (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan konsumsi per kapita riil yang disesuaikan (PPP – *Purchasing Power Parity* – dalam rupiah). Adapun hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.5.

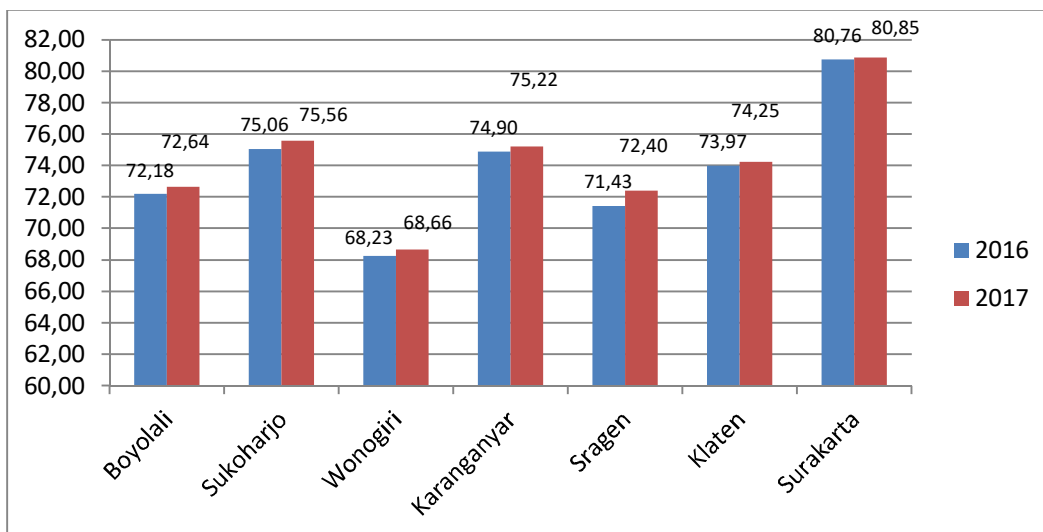
Tabel 2.5.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Indikator IPM	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,52	76,54	76,55	76,59	76,68
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,74	7,92	8,16	8,22	8,23
Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,27	12,74	12,84	12,85	12,97

Indikator IPM	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Riil Per kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.962	10.965	11.178	11.227	11.227,09
IPM	72,42	73,19	73,81	73,97	74,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 dan Bappeda Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

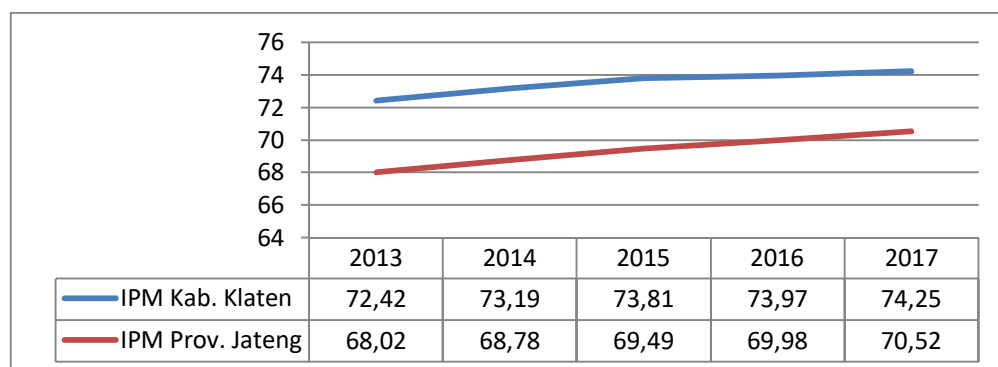
Dari Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 72,42 pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi sebesar 73,19, pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar 73,81, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 73,97, dan pada tahun 2017 menjadi 74,25. Besaran IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) mencerminkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017. Capaian IPM Tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 74,25 tetapi jika dibanding dengan daerah di sekitar pencapaian angka IPM Kabupaten Klaten masih berada di bawah Kabupaten Karanganyar (75,22), Kabupaten Sukoharjo (75,56), dan Surakarta (80,85). Perbandingan IPM Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/kota sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Gambar 2.11.



Sumber: BPS Jawa Tengah 2017

Gambar 2.11.
Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dengan Kabupaten sekitar Tahun 2016-2017

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 IPM Kabupaten Klaten dibandingkan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Klaten masih di atas IPM Jawa Tengah. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.12.
Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dengan Jawa Tengah Tahun 2013-2017

2.1.2.7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 108,20%, seiring dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pendidikan, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 97,45%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 90,35% pada tahun 2013, dan pada tahun 2017 menjadi 90,93%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga berasal dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan sekolah dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Begitu juga untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2013 sudah mencapai 65,07%, meningkat menjadi 81,00% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C serta semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Namun pada tahun 2017 terjadi peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten
Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SM LB/Paket B	SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	108.20	90.35	65.07
2	2014	92.27	87.26	68.69
3	2015	94.53	87.58	93.06
4	2016	105.23	97.57	81.00
5	2017	97.45	90.93	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

2.1.2.8. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 92,84%, turun menjadi 86,84% pada tahun 2017. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2013 mencapai 64,61% mengalami kenaikan menjadi 68,22% pada tahun 2017, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Begitu juga untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2013 mencapai 42,75%, meningkat menjadi 54,41% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013- 2017

No	Tahun	SD /MI /SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPL B/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	92,84	64,61	42,75
2	2014	79,13	62,48	44,08
3	2015	81,60	63,94	60,46
4	2016	91,26	72,77	54,41
5	2017	86.84	68,22	-

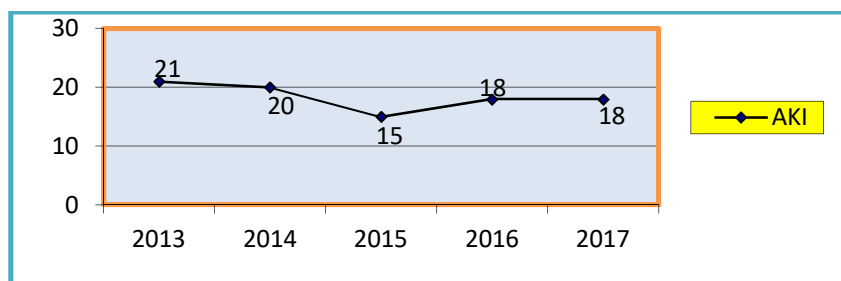
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018



Yang perlu menjadi catatan adalah perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

2.1.2.9. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, adalah akibat hipertensi dan pendarahan dan juga disebabkan faktor non medis. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.13.

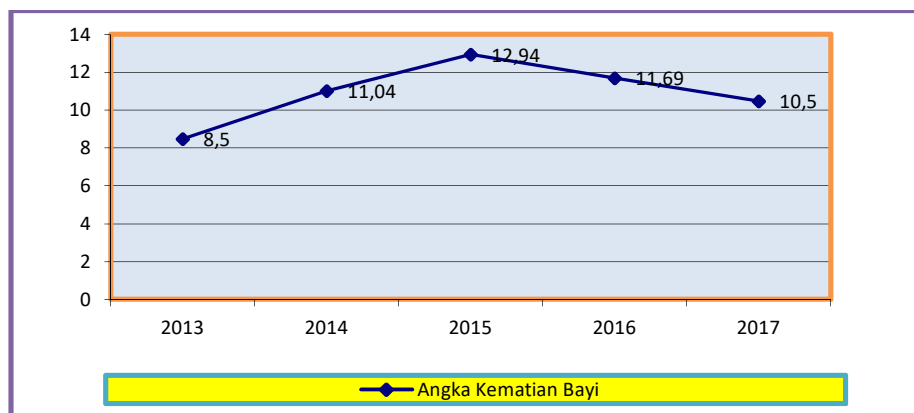


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

Gambar 2.13.
Perkembangan Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

2.1.2.10. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Meski dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti Kecamatan : Bayat, Juwiring, Pedan dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

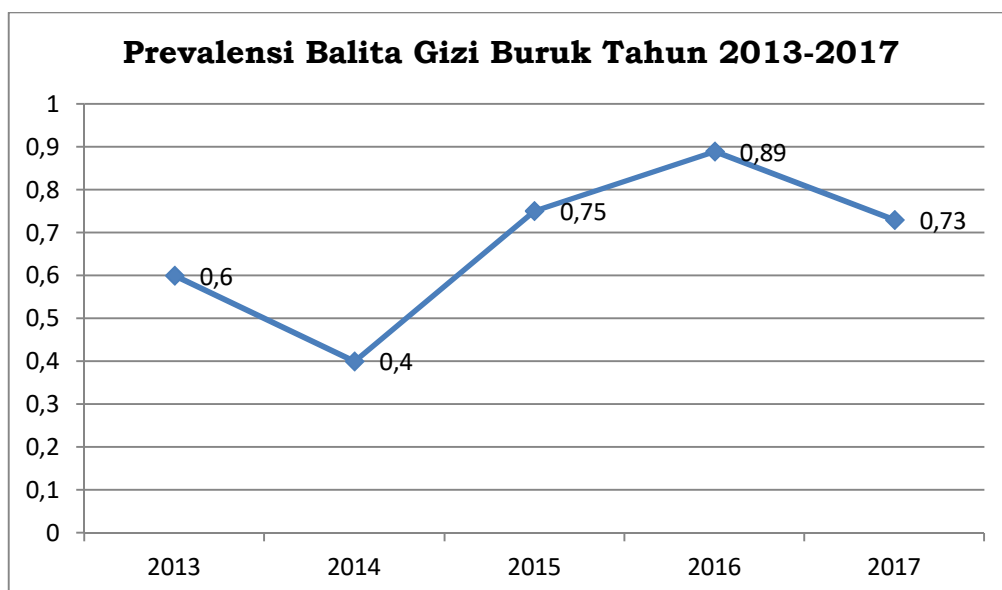


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2018

Gambar 2.14.
Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

2.1.2.11. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Kondisi Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Selain kondisi sosial ekonomi keluarga, penyebab balita gizi buruk karena faktor medis. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus balita gizi buruk yang tinggi, adalah Kecamatan Gantiwarno, Trucuk dan Jogonalan. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.15.

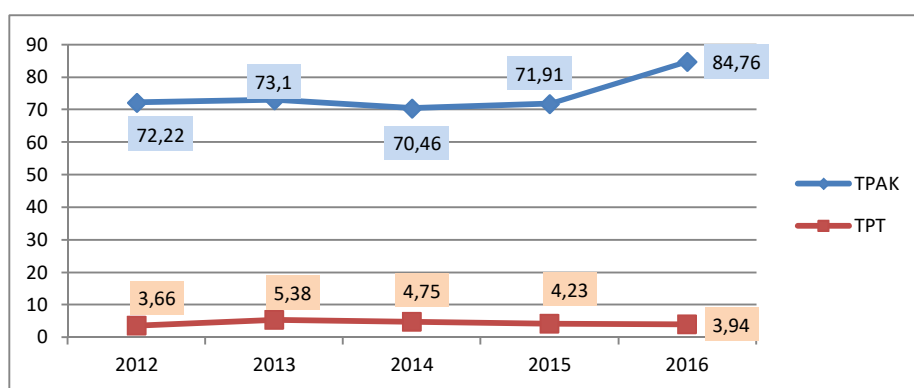


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2018

Gambar 2.15.
Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

2.1.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten menunjukkan kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Angka TPAK yang pada tahun 2012 sebesar 72,22%, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 84,76%. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka bersifat fluktuatif pada tahun 2012 sebesar 3,66%, dan pada tahun 2016 turun menjadi 3,94%. Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten 2017

Gambar 2.16.

Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

2.1.2.13. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Klaten stabil. Bidang olahraga perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Kelompok Kesenian	177	122	122	122	122
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	25	25	25	25
3	Jumlah Klub Olahraga	16	16	16	16	16
4	Jumlah prasarana olahraga	1	1	1	1	1
5	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat nasional	-	-	17,14	15	-

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Klaten, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Wajib

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten dilihat pada tahun 2013-2017 mempunyai kecenderungan peningkatan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2013 mencapai 72,67% menjadi 86,52% pada tahun 2014. Sedangkan jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2013 sebesar 87,37% menjadi 77,79% pada tahun 2014. Gambaran Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

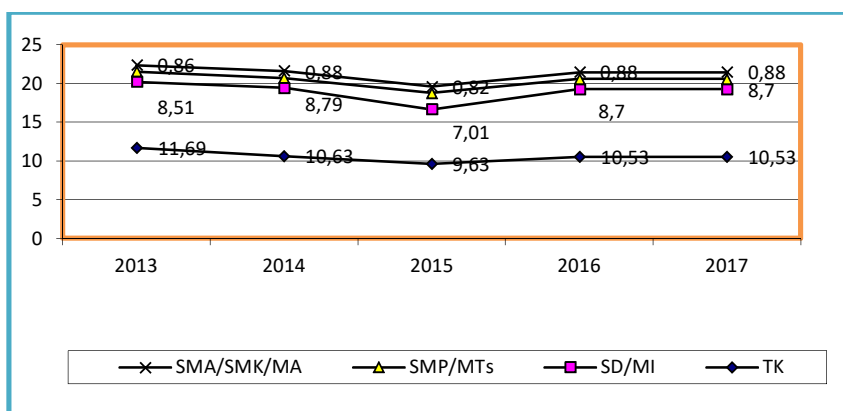
Tabel 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	SD / MI / SDLB /Paket A	SMP/MTs/SM PLB/Paket B	SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	119,63	93,65	57,28
2	2014	88,81	72,67	48,37
3	2015	82,24	86,52	67,33
4	2016	93,83	86,83	51,51
5	2017	96,6	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Gambaran rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.17.

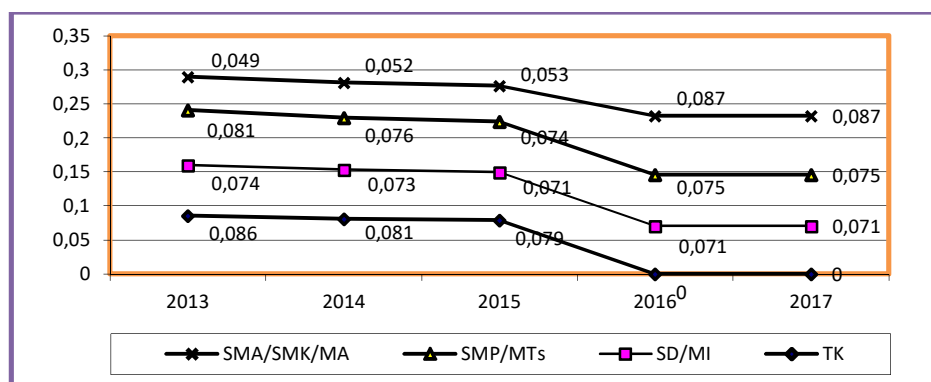


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.17.
Rasio Ketersediaan Sekolah
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

3. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid menunjukkan mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada Tahun 2013-2017 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena banyak guru yang pensiun, serta formasi pengadaan guru baru tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pendidikan yang dibutuhkan. Adapun gambaran selengkapnya Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.18.
Rasio Guru dan Murid
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

4. Fasilitas Pendidikan

Selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) ruang kelas dalam kondisi baik semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sebagai gambaran perkembangan persentase ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Perkembangan Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,55	69,67	69,29	73	81
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,20	89,61	88,23	89	96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

5. Angka Putus Sekolah

Dalam lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) angka putus sekolah yang diukur dengan jumlah anak putus sekolah bersifat fluktuatif. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus %	32 0.03	31 0.03	27 0.02	33 0.03	44 0.04
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus %	81 0.16	36 0.07	56 0.10	43 0.08	92 0.23
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA	Kasus %	374 0.92	285 2.12	295 0.73	283 0.69	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan data angka putus sekolah, memberikan gambaran bahwa untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja atau anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal daripada sekolah formal berlama-lama.

6. Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI

Dalam lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) guru yang memenuhi kualifikasi D4/SI semakin naik. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	%	63,53	72,32	79,09	81,99	84,16
Jenjang Pendidikan SMP/MTS	%	89,54	90,70	92,09	91,51	60,33
Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	%	95,10	96,11	96,71	97,06	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang PAUD selama lima tahun terakhir tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini menjadi kebutuhan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi PAUD. Sebagai gambaran Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
APK PAUD	55,73	58,32	92,19	92,37	78,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

B. Kesehatan

1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 tidak menunjukkan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, adapun gambaran Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2016	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2017	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih didominasi dokter umum sebagai ujung

pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Adapun gambaran Rasio Dokter Per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	115	0,078	41	0,028	19	0,0128
2016	352	0,237	110	0,074	97	0,0653
2017	521	0,446	195	0,167	109	0,093

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

3. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunisation* di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.16.

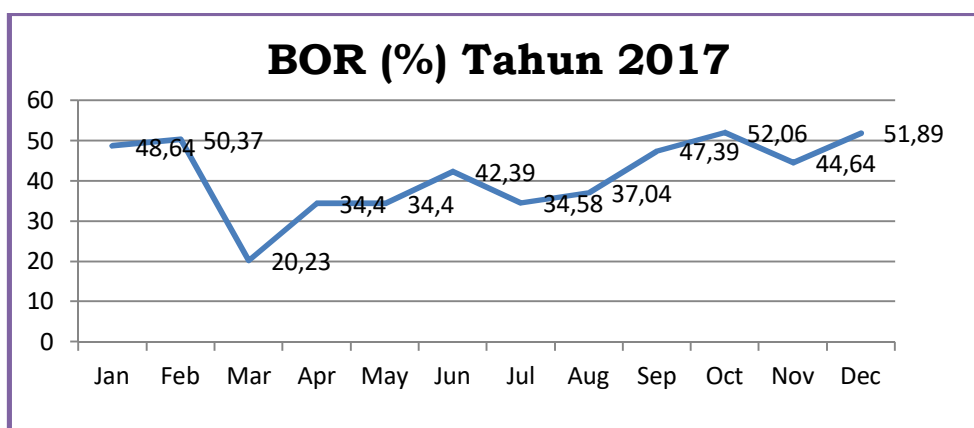
Tabel 2.16.
Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %
2016	401	401	100 %
2017	401	401	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

4. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu) per Januari 2017 s/d Desember 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Sumber: RSUD Bagas Waras, 2018

Gambar 2.19.
Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Di samping itu, pada tahun 2016, jumlah kunjungan pasien sebanyak 56.103 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata

kunjungan rawat inap sebanyak 5.966 orang/tahun (atau rata-rata 16 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 50.137 orang/tahun (atau rata-rata 137 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 7.509 orang/tahun (atau rata-rata 20 orang/hari).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prasarana jalan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Ukuran kinerja pelayanan prasarana jalan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kondisi prasarana jalan Kabupaten Klaten hingga Tahun 2017 sebagai berikut

- Jalan kondisi baik : 470,61 km (61,15%)
- Jalan kondisi sedang : 169,03 km (21,96%)
- Jalan kondisi rusak :
 - Rusak ringan : 62,90 km (8,17%)
 - Rusak berat : 67,09 km (8,72%)

2. Prasarana Sumber Daya Air

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten tercakup 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten dengan luasan sebesar 29.713 ha. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kondisi DI Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagai berikut

- DI kondisi baik : 7.208 ha (24,26%)
- DI rusak sedang : 15.303 ha (51,50%)
- DI rusak berat : 7.202 ha (24,24%)

3. Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, khususnya jamban sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai target *Millenium Development Goal's*. Capaian air bersih tahun 2017 mencapai 84,74 %. Sedangkan cakupan akses sanitasi telah sampai 90,80% akses dengan perincian 86 % wilayah perkotaan dan 71,34 % wilayah perdesaan. Sesuai

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi pada tahun 2019 sebagaimana target akses universal (*universal acces*).

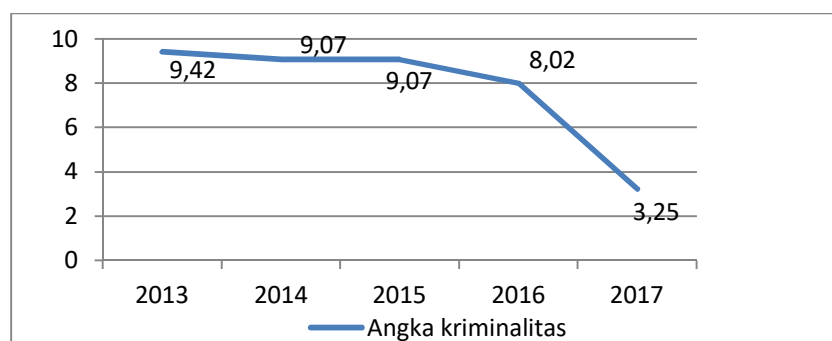
Upaya pemenuhan akses universal khususnya terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui PDAM, optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, CSR, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Klaten. Sementara ini tercatat sebanyak 333.456 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2015 sebanyak 24.775 unit, dan pada tahun 2016 telah diperbaiki sebanyak 1087 unit, dan tahun 2017 sebanyak 2.378 unit.

E. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk penciptaan kondusivitas daerah. Hal ini krusial mengingat cakupan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan. Data menunjukkan bahwa jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91. Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 sebagaimana Gambar 2.20.



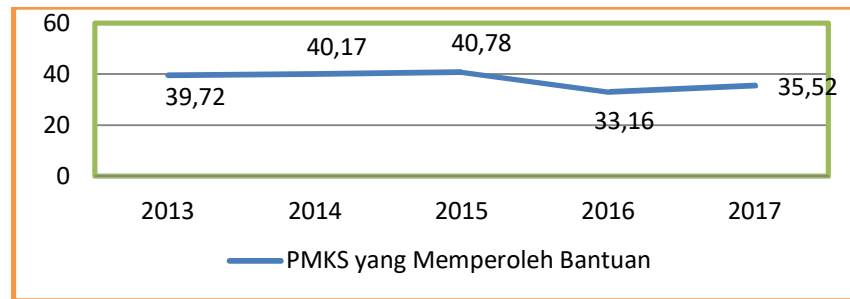
Sumber: Kesbangpol 2018, (diolah)

Gambar 2.20.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017



F. Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten. Gambaran PMKS yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Klaten, 2018.

Gambar 2.21.
PMKS yang Memperoleh Bantuan

Berdasarkan Gambar 2.21. di atas dapat dijelaskan bahwa, PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS Begitu pula upaya penanganan penyandang difabel. Gambaran jumlah penyandang difabel menurut kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Penyandang Difabel Menurut Kecamatan dan Jenis Berdasarkan Basis Data Terpadu

NO	KECAMATAN	DAKSA	NETRA	RUNGU	WICARA	RUNGU & WICARA	NETRA & DAKSA	NETRA & RUWI	RUWI & DAKSA	RUWI, NETRA, DAKSA	RETARDASI MENTAL	MANTAN GANGGUAN JIWA	DAKSA MENTAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	BAYAT	150	88	52	30	18	11	7	4	10	126	55	41	592
2	CAWAS	171	78	55	26	22	16	4	16	14	149	70	93	714
3	CEPER	86	50	40	11	18	19	5	17	6	154	66	84	556
4	DELANGGU	56	42	25	17	13	10	1	8	7	111	33	56	385
5	GANTIWARNO	155	51	44	18	21	11	5	8	8	128	49	90	588
6	JATINOM	114	48	49	16	14	11	5	5	6	141	29	44	482
7	JOGONALAN	136	75	43	14	16	11	6	8	8	103	42	47	509
8	JUWIRING	121	79	68	23	21	15	8	20	5	99	42	80	581
9	KALIKOTES	90	43	14	12	9	4	2	4	6	63	28	34	309
10	KARANGANOM	74	43	14	19	20	8	4	6	10	120	48	49	415
11	KARANGDOWO	133	68	26	20	12	8	8	4	5	109	38	35	466
12	KARANGNONGKO	114	33	20	7	22	8	7	3	2	135	33	69	453
13	KEBONARUM	34	16	8	1	8	2	0	0	1	48	17	41	176
14	KEMALANG	85	50	23	8	18	7	3	5	1	83	23	51	357
15	KLATEN SELATAN	89	27	17	6	8	4	1	5	1	92	25	45	319
16	KLATEN TENGAH	31	21	8	4	6	4	3	4	2	58	18	25	184
17	KLATEN UTARA	51	28	18	6	4	2	2	2	6	40	14	24	197
18	MANISRENGGO	92	37	41	13	21	12	9	7	3	112	41	57	445
19	NGAWEN	105	60	25	4	10	4	5	1	6	131	32	27	406
20	PEDAN	116	57	30	18	19	6	7	9	3	90	33	49	437
21	POLANHARJO	102	43	33	13	8	4	6	8	8	97	34	77	433
22	PRAMBANAN	110	40	32	14	17	6	7	7	7	124	29	37	430
23	TRUCUK	130	79	96	38	21	18	12	10	11	134	52	76	677
24	TULUNG	115	54	21	12	12	10	3	11	1	84	27	33	383
25	WEDI	111	61	55	24	23	10	4	7	5	160	50	53	603
26	WONOSARI	144	51	44	25	14	8	12	10	10	103	29	55	489
	TOTAL	2715	1322	901	399	395	229	136	189	152	2794	957	1372	11586

Sumber: PBDT 2015 Kabupaten Klaten

G. Ketenagakerjaan

Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui lebih rinci terkait ketenagakerjaan dapat disajikan beberapa indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017 sebagaimana Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

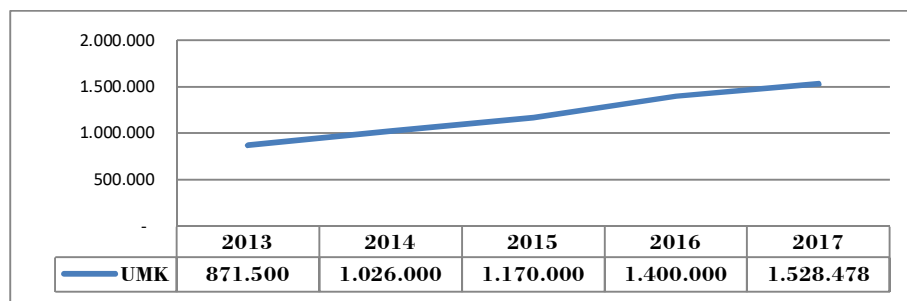
INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	orang	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
Kegiatan utama penduduk usia kerja						
Bekerja	%	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	%	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	%	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	%	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	%	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	3,66	5,38	4,75	4,75
Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja						
Pertanian	%	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	%	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	%	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	%	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	%	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	%	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	%	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	%	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	%	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
Status pekerjaan penduduk yang bekerja						
Berusaha sendiri	%	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	%	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	%	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	%	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	%	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

*) data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil, 2018

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat dengan ditunjukkan



meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Perkembangan UMK selama tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar 2.22.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2018.

Gambar 2.22.
Perkembangan UMK Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun mulai terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2013- 2017

Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemas, Sosial dan Perorangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321
2015	32.773	1.488	17.795	2.504	49.714
2016	32.093	1.348	16.957	6.351	42.762
2017					

Sumber: Dinsoskertrans Kabupaten Klaten, 2018

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan capaian IPG dan IDG yang semakin baik.



Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Gambar 2.24
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain itu upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan menurunnya jumlah anak dan perempuan korban kekerasan yang disajikan dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Jumlah Korban kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Jumlah
	Anak	Peremp.	Anak	Peremp.	Anak	Peremp.	Anak	Peremp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2017	13	6	18	2	12	-	5	6	62
2016	11	16	2	8	28	1	-	6	72
2015	7	10	2	-	20	-	-	3	42
2014	6	40	-	5	30	2	-	7	90
2013	21	39	-	2	36	8	1	16	123

Sumber: P2TP2A Kabupaten Klaten, 2018

I. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dengan produksi padi sawah 380.268 ton per tahun, produksi jagung 90.343 ton, dan produksi kedelai sebanyak 4.440 ton. Adapun jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2017

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Minus (Ton)	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi sawah	380,268	266,187	123,314	142,873	83.93	*)
2	Jagung	90,343	81,310	4,819	76,491	3.28	89.00%
3	Kedelai	4,440	4,173	33,808	-29,634	23.01	94.66%
4	Kacang tanah	1,527	1,321	711	610	0.55	86.49%
5	Kacang Hijau	285	265	271	-5	0.21	93.00%
6	Ubi Kayu	9,778	9,260	11,047	-1,786	8.55	95.87%

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Minus (Ton)	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Ubi Jalar	251	220	2,481	-2,260	1.92	88.00%
8	Daging	1,099	1,088342	16,162	-15,073658	1.97	99,02%
9	Gula	5,0415450	4,789468	15,692	-10,902532	10.68	95,00%
10	Telur	9,1671790	8,979252	5,877	3,102252	4.0	97,95%
11	Susu	3,1987650	2,696599	5,231	-2,534401	3.56	84,31%
12	Ikan	22,5508020	21,874278	13,664	8,210278	10.96	97,00%

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.21 di atas diketahui bahwa untuk data pada tahun 2017 ketersediaan beras mencapai 266,187 ton, sedangkan untuk kebutuhan beras 123,314 ton sehingga masih surplus beras 142,873 ton. Ketersediaan beras dan surplus beras pada tahun 2017 ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 6,773 ton. Sedangkan untuk jagung juga mengalami surplus sebesar 76,491 ton pada tahun 2017 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60.361 ton. Sementara untuk kedelai mengalami minus sebesar 29,634 ton, hal ini disebabkan karena menurunnya luas areal tanam dan pengaruh iklim global, sedangkan kebutuhan meningkat sebesar 33,808 ton jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 29.729 ton.

**Tabel 2.22 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013 - 2017**

Kelompok Pangan		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi-padian	16.5	16.7	18.8	20.2	20.8
2.	Umbi-umbian	2.5	2.5	2.1	1.2	1.4
3.	Pangan Hewani	24.0	24.0	24.0	24	24
4.	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	4.3	3.8	3,7
5.	Buah/Biji Berminyak	1.0	1.0	0.3	0.5	0.7
6.	Kacang-kacangan	10.0	10.0	10.0	10	10.0
7.	Gula	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9
8.	Sayur dan Buah	30.0	30.0	30.0	30	30.0
9.	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0	0
Total		91.5	91.7	91.4	91.6	92,5

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten Klaten, 2017

Dari Tabel 2.22 tersebut diatas terlihat bahwa Skor Pola Harapan Pangan terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun belum signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 91,5 dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,5.

J. Pertanahan

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2013-2017 bersifat flutuaktif. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2. 23.

Tabel 2.23.
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2013-2017

No	Jenis Sertifikat Hak Atas tanah	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hak milik	11.084	510,826	620.378	631.768	580.537
2	Hak guna usaha	-	3	4	4	3
3	Hak guna bangunan	303	5.886	6.375	6.712	8.582
4	Hak pakai	58	3.632	3.932	3.956	3.736
5	Hak pengelolaan	-	2	6	6	5
6	Satuan Rusun	-	1.363	1.384	1.384	1.384
7	Hak Wakaf	70	888	1.003	1.079	1.554
	Jumlah	11.515	522.600	633.082	644.909	595.801

Sumber: Bappeda, 2018 (diolah)

K. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah, sampah padat, limbah cair, dan polusi udara serta belum mencukupinya proporsi ruang terbuka hijau.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satunya diarahkan untuk mewujudkan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2017 tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 928.129 jiwa, dan jumlah penduduk ber-Akta kelahiran sebanyak 1.108.202 jiwa. Adapun jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.24.



Tabel 2.24
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Akte	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelahiran	17.741	16.127	10.540	10.130	20.749
2	Kematian	137	275	393	239	1.487
3	Perkawinan	462	474	469	753	260
4	Perceraian	55	54	63	41	20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, 2018

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan 3.689 RW dan 9.593 RT yang didukung oleh aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari 391 Kades, 2.048 Perangkat Desa dan 3.210 BPD. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbesar adalah Kecamatan Cawas dengan 20 desa, 4 (empat) kecamatan memiliki 19 desa yaitu : Kecamatan Wedi, Karangdowo, Juwiring dan Karanganom. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan 3 desa. Jumlah Dukuh di seluruh Kabupaten Klaten sebanyak 3.703 dukuh. Untuk mendorong kemandirian desa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan program pemberdayaan masyarakat sampai basis desa/kelurahan.

Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten meliputi :

1. Kawasan Sentral Batik : Ds. Jarum, Ds. Banyuuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon (Kec. Bayat)
2. Kawasan Sentral Instruksi Lurik dan Pertanian Organik : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Ds. Banaran (Kec. Cawas)
3. Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi : Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nangsri (Kec. Manisrenggo)
4. Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo (Kec. Kemalang)
5. Kawasan Perdesaan Berrbasis Mandiri Pangan : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggan, Ds. Melikan (Kec. Wedi).

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

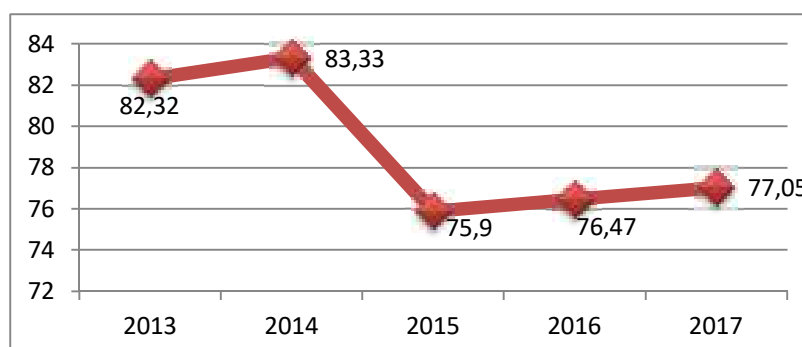
Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2013 sebanyak 25.905 peserta KB baru, dan pada tahun 2014 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, namun pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, dan tahun 2016 menjadi sebanyak 26.461 peserta, dan pada tahun 2017 turun menjadi 23.783 peserta. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Peserta KB dan KB Aktif
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.629

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Klaten, 2018

Secara prosentase, peserta KB dan KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat digambarkan dalam gambar 2.25.



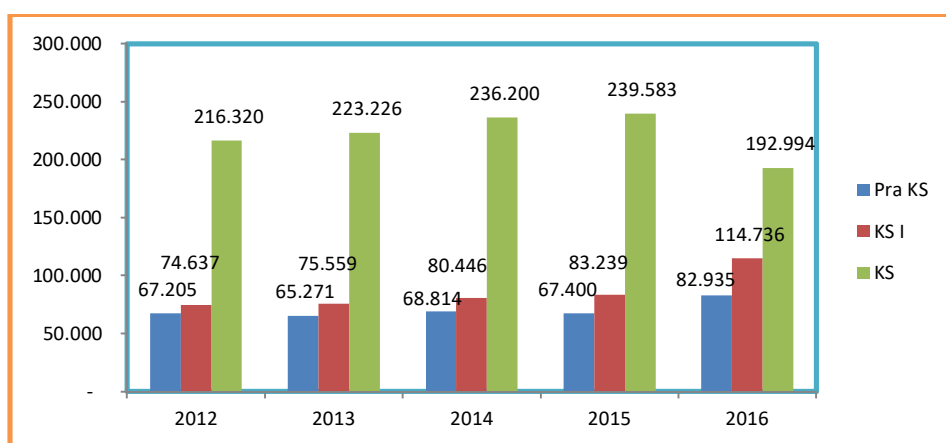
Gambar 2.25.
Prosentase Peserta KB dan KB Aktif
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Sedangkan berdasarkan pentahapan Keluarga Sejahtera (KS), selama tahun 2013-2017 terjadi penurunan keluarga Pra Sejahtera dan peningkatan dalam Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus



(KS III dan KS Plus). Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 67.205 KK Pra KS, dan pada tahun 2017 naik menjadi sebanyak 80,935 KK Pra KS, sedangkan keluarga KS I pada tahun 2013 tercatat sebanyak 74.637 KK KS, dan pada tahun 2017 naik menjadi sebanyak 114.736 KK KS I, sementara keluarga KS pada tahun 2013 tercatat sebanyak 216.320 KK KS, dan pada tahun 2017 turun menjadi sebanyak 192.994 KK KS. Adapun gambaran Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Klaten 2018, (diolah)

Gambar 2.26.
Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2013 – 2017 (dalam satuan Kepala Keluarga/KK)

O. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik dapat dilihat pada pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2013 (unit)	2014 (unit)	2015 (unit)	2016 (unit)	2017 (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Sepeda Motor					
02 Mobil Penumpang					
03 Mobil Barang	10.241	10.819	11.049	10.657	9.622
04 Mobil Bus					
* Umum	344	386	464	347	397

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bus Besar	119	80	44	13	65
Bus Sedang	125	196	131	105	261
Bus Kecil	100	110	289	229	71
* Bukan Umum	214	199	155	137	105
05 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	3	9	9	6
06 Mobil Penumpang Umum	-	-	-	-	-
07 Kendaraan Roda Tiga	-	-	-	-	-
Jumlah	10.811	11.365	11.599	11.267	10.130

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

P. Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klatenkab.go.id, sementara untuk sebaran jaringan internet sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran (1 milik pemerintah daerah/RSPD, 6 lainnya milik swasta/komunitas) dan terdapat 7 buah surat kabar lokal. Pada tahun 2017 persentase sistem berbasis informasi sebanyak 20 sistem informasi.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 2.27

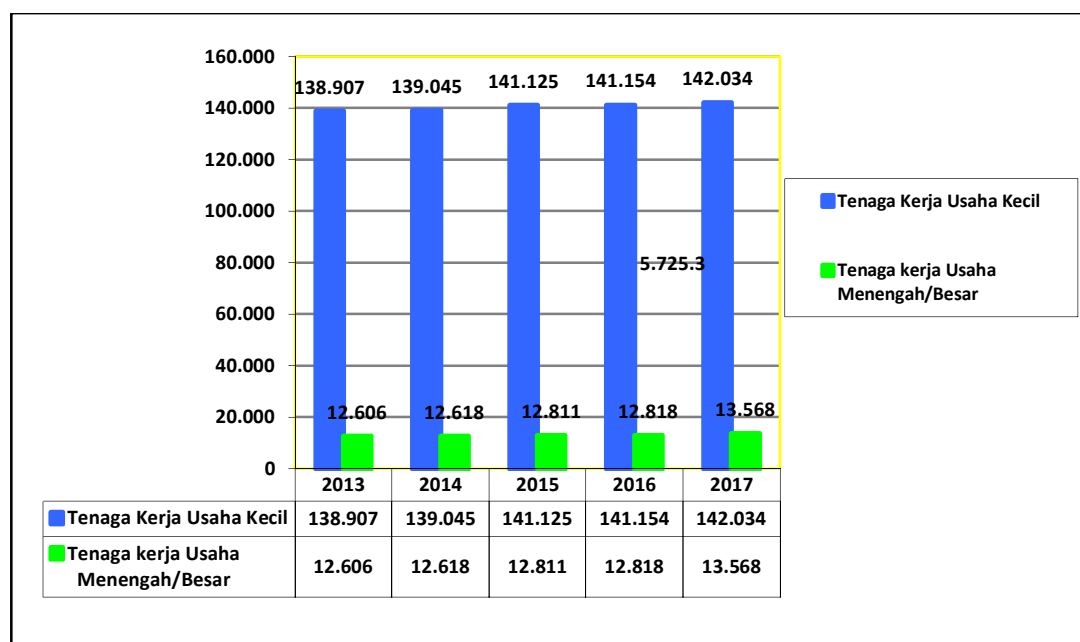
Tabel 2.27 Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 - 2017

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koperasi	890	890	905	943	883
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	534	534	543	566	581
4	Koperasi Tidak Aktif	356	356	362	377	302
5	Koperasi Sehat	10	10	11	12	14
6	Koperasi Cukup Sehat	524	524	532	554	567
7	Jumlah Pengusaha	Jumlah (Orang)				
	a).Pengusaha Kecil	34.251	34.155	34.666	34.672	34.760

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b).Pengusaha Menengah/Besar	130	131	133	134	159
8	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)				
	a).Usaha Kecil	138.907	139.045	141.125	141.154	142.034
	b).Usaha Menengah/Besar	12.606	12.618	12.811	12.818	13.568

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, 2018

Penyerapan kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 138.907 orang pada tahun 2013 menjadi 142.034 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2013 sebanyak 12.606 orang menjadi sebanyak 13.568 orang pada tahun 2017. Gambaran trend jumlah tenaga kerja di perusahaan kecil dan menengah/besar Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2. 27.



Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.27.
Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013 - 2017

Berdasarkan Tabel 2.84 tentang Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan karena : 1) pemasaran produk, banyak produk-produk yang menumpuk pada para pelaku kecil, yang tentu saja secara tidak langsung akan berdampak pada pemberhentian tenaga kerja; 2) disamping itu juga disebabkan karena faktor usaha musiman, yaitu bahwa pada musim-

musim tertentu pelaku usaha akan kebanjiran pesanan sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya di saat sepi pesanan.

Sedangkan kondisi UKM sampai dengan saat ini yang memiliki daya saing baru mencapai 5% dari total jumlah UKM sebanyak 34.760 unit usaha. Kemudian dari sejumlah 883 unit koperasi, sampai dengan tahun 2017, koperasi yang aktif sebanyak 581 unit, yang sehat sebanyak 14 unit dan cukup sehat sebanyak 567 unit koperasi dengan manager yang memiliki sertifikat baru ada 65 orang. Sedangkan untuk penurunan jumlah koperasi pada tahun 2017 disebabkan adanya penutupan sejumlah koperasi yang betul-betul sudah tidak aktif dan tidak operasional.

Disamping itu di Kabupaten Klaten juga telah menetapkan 7 (tujuh) Produk Unggulan Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Mebel, Logam, Keramik dan Tembakau. Disamping itu Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi trademark dan brand image bagi Kabupaten Klaten.

R. Penanaman Modal

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan realisasi PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Realisasi PMDN
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	1	1	21	12	7
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.000	100	3.959	2.861	2.781
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	167.500.000	25.000.000	401.071.500	89.208.500	333.495.600

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2018

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan realisasi investor PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.28
Perkembangan Realisasi PMA
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	5	6	5	5	2
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.075	521	230	1.468	79
3	Nilai Investasi	(US \$)	6.700.000	12.246.600	7.080.000	11.278.800	15.979.6000
4							

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2018

Dari Tabel 2.28. dan Tabel 2.29., terlihat bahwa Penanaman modal daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selalu bersifat fluktuatif, karena sangat tergantung pada situasi pasar. Indikator perkembangan penanaman modal daerah menggunakan 3 (tiga) tolok ukur meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi.

S. Pemuda dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan, maupun kegiatan keolahragaan relatif stabil, dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	34	35	35	35	35
2	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	26	26	26
4	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	8	8	8

Sumber: Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

T. Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Salah satu kunci dari pentahapan pembangunan tersebut, adalah kebutuhan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

U. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	52	52	52	52	52
2	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber: Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

2. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat relatif tidak



ada perubahan, dan sebagai gambaran Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jml Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandang Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1
5	Lainnya		-	-	-	-	-

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

V. Perpustakaan

Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan desa sebanyak 29 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 3 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk menjangkau lokasi yang tidak terjangkau bus keliling, serta mendukung kegiatan car free day. Perkembangan kondisi perpustakaan di Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan jumlah koleksi dan jumlah pengunjung perpustakaan yang dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Perkembangan Jumlah Koleksi dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	36.020	38.481	41.464	43.979	44.687
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	6.842	7.648	7.673	40.003	41.225

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.33. di atas, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibanding pada tahun-tahun yang lalu, hal ini dikarenakan adanya tambahan data jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling dan pengunjung saat car free day.

W. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak



65.526 arsip, dan pada tahun 2016 setelah divalidasi tinggal 19.588 arsip, dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 80.200 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Arsip	Jumlah	65.526	71.161	68.700	74.700	78.434

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan: (i) Kelautan dan Perikanan, (ii) Pariwisata, (iii) Pertanian, (iv) Kehutanan, (v) Energi dan Sumber Daya Mineral, (vi) Perdagangan, (vii) Perindustrian, dan (viii) Ketransmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam. Gambaran Produksi Ikan dan Jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (ton)

Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	7.894,28				0,00	94,95	7.989,23
02 Gantiwarno	4.687,85				92,10	0,00	4.779,95
03 Wedi	5.120,40				42,56	0,00	5.162,96
04 Bayat	16.969,67		1.811,10	1.753,00	76,73	0,00	20.610,50
05 Cawas	613,86				138,75	0,00	752,61
06 Trucuk	1.292,30				117,94	0,00	1.410,24
07 Kalikotes	1.017,55				0,00	46,02	1.063,57
08 Kebonarum	11.816,21				0,00	47,51	11.863,72
09 Jogonalan	6.101,96				115,62	0,00	6.217,58
10 Manisrenggo	11.167,04				10,85	9,24	11.187,13
11 Karangnongko	5.131,13	8,40			75,12	132,29	5.346,94
12 Ngawen	1.570,79				0,00	106,36	1.677,15
13 Ceper	808,57				36,07	0,00	844,64
14 Pedan	620,65				13,52	0,00	634,17
15 Karangdowo	623,39		1,65		0,00	63,30	688,34
16 Juwiring	2.939,02				0,00	38,26	2.977,28
17 Wonosari	13.303,75		63,80		0,00	304,41	13.671,96
18 Delanggu	4.985,81				84,52	17,45	5.087,78
19 Polanharjo	65.984,39	35,00			0,00	35,10	66.054,49
20 Karanganom	3.687,97	4,25			0,00	18,42	3.710,64

Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21 Tulung	86.181,47	3,92			75,81	0,00	86.261,20
22 Jatinom	3.589,44				35,16	0,00	3.624,60
23 Kemalang	1.485,83				0,00	55,61	1.541,44
24 Klaten Selatan	8.735,13				0,00	559,72	9.294,85
25 Klaten Tengah	1.637,29				288,95	48,36	1.974,60
26 Klaten Utara	3.566,77				331,30	0,00	3.898,07
Jumlah 2017	271.532,52	51,57	1.876,55	1.753,00	1.535,00	1.577,00	278.325,64
2016	271.532,52	51,57	1.876,55	1.753,00	1.535,00	1.577,00	278.325,64
2015	254.559,82	0	1.685,56	1.775	1.030,00	247,00	259.297,38
2014	191.942,18	20	631,81	863	1.654,00	481,00	195.573,99

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.35. dapat dilihat pada tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Klaten dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya untuk produksi ikan dari budidaya kolam yang berada di Kawasan Minapolitan, yang meliputi kecamatan Karanganyar, Tulung, dan Kecamatan Polanharjo.

Selain itu, di beberapa wilayah kecamatan juga mengalami peningkatan produksi perikanan yang cukup signifikan, antara lain: di keramba-keramba wilayah kecamatan Prambanan, Kebonharjo, Manisrenggo, Klaten Selatan, dan Wonosari.

Peningkatan produksi perikanan ini disebabkan adanya penambahan jumlah luasan budidaya serta adanya usaha intensifikasi budidaya perikanan dan penggunaan bibit unggul. Produksi ikan dalam daerah didominasi oleh jenis ikan Nila dan Lele. Untuk belut, produksi dalam daerah belum mencukupi, setiap tahun masih mendatangkan dari luar daerah khususnya dari daerah Jawa Timur. Produksi perikanan ini terkait erat dengan pola atau tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten. Untuk memahami tingkat konsumsi ikan dapat diturunkan dari jumlah produksi ikan (kg) dibagi dengan kapita setiap tahun. Secara terinci tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten

No.	Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)
1	2013	12,79
2	2014	12,92
3	2015	13,06
4	2016	15,14
5	2017	18,50

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018.

B. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganyam
12.	Candi Plaosan	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Manten	Wisata Air	Kec. Polanharjo
18.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
19.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
20.	Desa Wisata Kebon Dalem Kidul	Wisata Budaya dan Industri	Kec. Prambanan
21.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
22.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
23.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
24.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
25.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
26.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten , 2018

2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo,

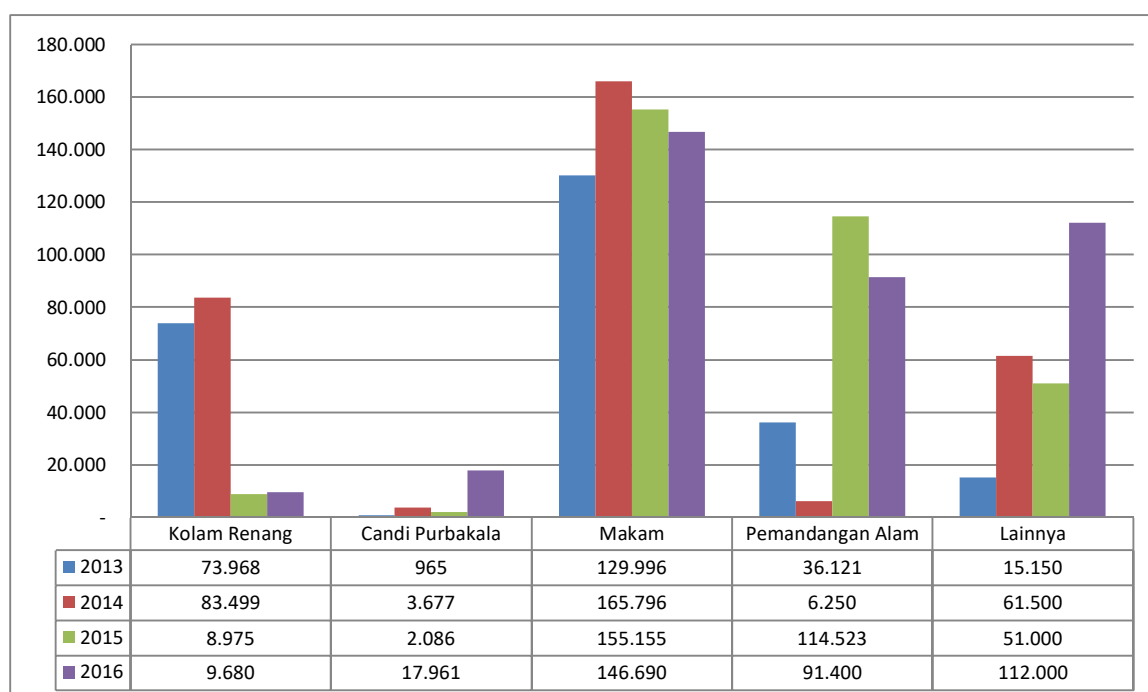
Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

3. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

4. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Perkembangan jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2016 dapat disajikan pada Gambar 2.28.



Sumber: Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.28.
Perkembangan Pengunjung Obyek Wisata Tahun 2013-2016

C. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2015 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33.111 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.581 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25.809 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,897 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9,771 Ha; sistem

pengairan sederhana seluas 2,267 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,463 Ha. Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dalam satuan Ha)

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.240	13	1.190	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.315	46	1.086	3.447
06 Trucuk	1.908	2	1.471	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	719	2	246	967
09 Jogonalan	1.571	1	1.098	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.040	8	651	1.699
13 Ceper	1.531	7	906	2.444
14 Pedan	869	445	603	1.917
15 Karangdowo	2.047	69	807	2.923
16 Juwiring	1.999	12	968	2.979
17 Wonosari	2.217	14	883	3.114
18 Delanggu	1.296	1	580	1.877
19 Polanharjo	1.821	92	471	2.384
20 Karanganom	1.681	11	714	2.406
21 Tulung	1.737	467	996	3.200
22 Jatinom	603	1.543	1.407	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	804	3	636	1.443
25 Klaten Tengah	292	1	599	892
26 Klaten Utara	305	40	693	1.038
Jumlah 2017				
2016	33.066	6.581	25.909	65.556
2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.220	6.581	25.755	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2018

Sedangkan KP2B (Kawasan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari. Dengan peruntukan pertanian tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 39 Ha di luar LP2PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.39.



Tabel 2.39.
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Ha)

Tahun	Dari Sawah & Tegalan	Peruntukkan Bangunan Tanah				Jumlah
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	-	-	-	-	-	-
2016	45,3910	33,0577	8,9094	0,113	3,3109	45,3910
2015	55,2309	40,8997	13,6631	-	0,6681	55,2309
2014	54,1504	40,4863	13,6611	-	-	54,1504
2013	79,7695	44,8933	31,1604	-	3,7158	79,7695

Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2018

Di Kabupaten Klaten juga dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan ke depan bisa menjadi Kawasan Agropolitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini pengembangan kawasan Agropolitan belum dapat direalisasikan.

D. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha.

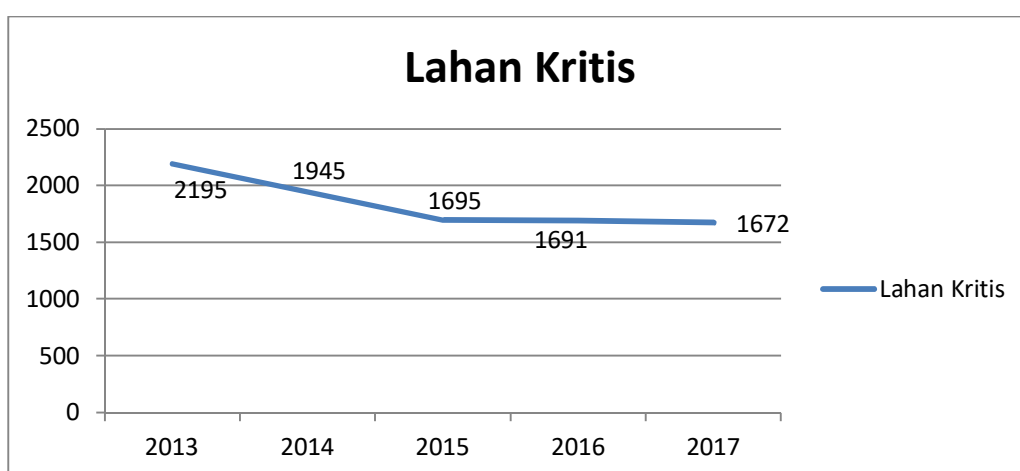
Hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

1. Hutan Lindung, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
2. Hutan Produksi, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis – filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500 m dpl.
3. Hutan Rakyat, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di



beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.

Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis seluas 1.695 Ha pada tahun 2015, mengalami penurunan seluas 250 Ha dibanding Tahun 2014 seluas 1.945 Ha. Sehingga masih diperlukan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya di wilayah kecamatan Kemalang, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Bayat, Prambanan, Wedi, dan Cawas. Adapun perkembangan lahan kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Gambar 2.29.
Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Selain itu di Kabupaten Klaten juga terdapat pengembangan hasil hutan non kayu, meliputi: budidaya tawon madu serta penangkaran burung berkicau, seperti: burung jalak bali, kenari, jalak suren, murai, jalak putih, cucak rowo, perkutut, dan burung *love bird* sampai dengan saat ini di Kabupaten sudah terdapat 190 penangkar burung (yang sudah resmi terdaftar).

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.40.



Tabel 2.40.
Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunbakan kontruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmar	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

F. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, dapat dilihat pada terlihat pada Tabel 2.41.



Tabel 2.41.
Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Departemen Store	1	1	1	1	1
02 Pasar Swalayan	108	118	118	118	118
03 Pasar Umum	81	81	81	81	81
04 Pasar Hewan	12	9	9	9	9
05 Pasar Buah	1	1	1	1	1
06 Pasar Sepeda	2	2	2	2	2
07 Pasar Ikan	0	0	0	0	0
08 Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	4	4
09 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	210	217	217	217	217

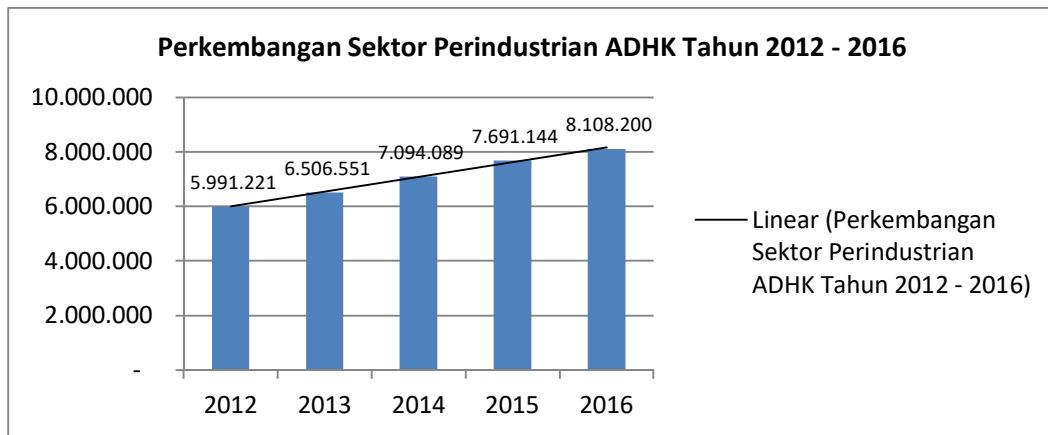
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.41. di atas dapat diketahui bahwa sarana perdagangan yang berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah sangat bervariasi, mulai dari bentuk departemen store, pasar swalayan sampai dengan pasar klitikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang semakin bervariasi dan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan teknologi, kondisi iklim usaha yang kondusif di daerah, disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan pasar swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

G. Perindustrian

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 32,82% (atau Rp.5.991.221, ribu) pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 35,74% (Rp.8.108.199,73 ribu). Adapun perkembangan sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012–2016 dapat disajikan pada Gambar 2.30.





Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

Gambar 2.30.
Perkembangan sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012-2016

Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2016 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2012-2016 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen dan Klaten Utara.

Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karanganom, Delanggu, dan Wonosari. Sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, dan Ceper. Sentra industri gerabah terdapat di Kecamatan Wedi, dan Bayat. Sentra industri mebel terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Ceper. Adapun sentra



industri konveksi terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Karanganom, Wonosari dan Pedan.

H. Transmigrasi

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Provinsi Maluku.

Jumlah transmigrasi tahun 2013 di Pulau Kalimantan sebanyak 10 KK (39 jiwa), tahun 2014 sebanyak 4 KK (15 jiwa), tahun 2015 sebanyak 30 KK (60 jiwa), tahun 2016 sebanyak 7 KK (30 jiwa), dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 19 KK (83 jiwa).

2.1.3.3. Penunjang Urusan Umum Pemerintahan

Di samping berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian. Adapun secara garis besar, sebagai berikut:

Penunjang urusan umum Pemerintahan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dalam pelaksanaannya telah memberi warna tentang Reformasi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Klaten.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN (Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional). Dari sebanyak 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014-2015, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum.



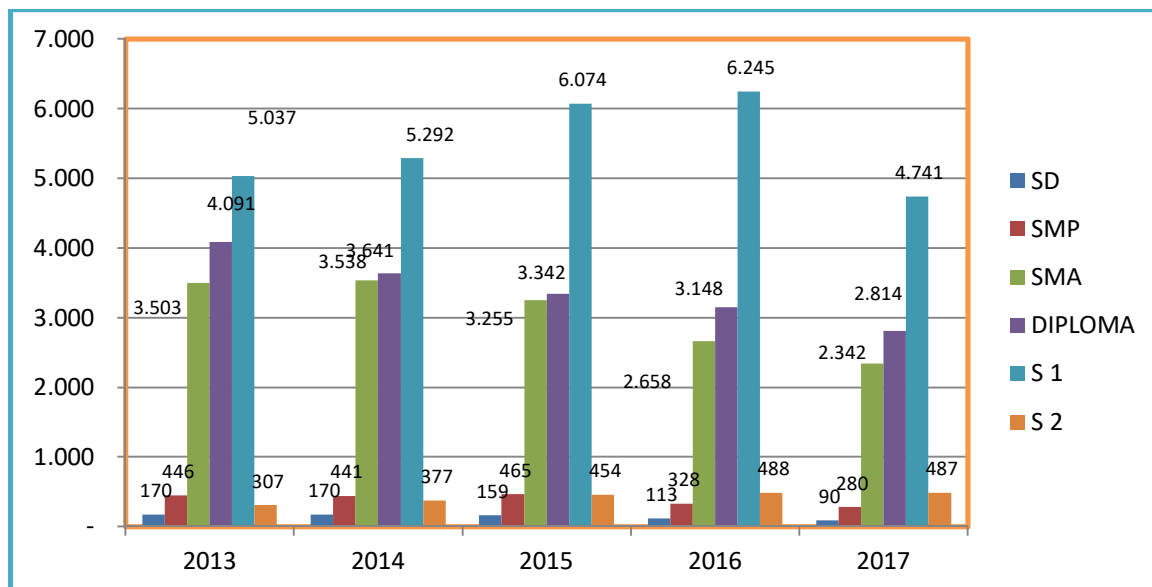
Sebagai gambaran kinerja DPRD diukur dari jenis dan jumlah keputusan selama tahun 2013-2017 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2013-2017

Komisi (1)	Fraksi				
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)
01. Perda	22	12	13	19	11
02. Keputusan DPRD	47	38	32	50	38
03. Keputusan Pimpinan DPRD	18	23	22	17	18
04. Keputusan Panitia Anggaran	7	6	9	8	18
05. Keputusan Panitia Musyawarah	12	13	16	16	12
Jumlah	106	92	92	110	97

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun, 2018

Di pihak lain, berdasar data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 10.754 orang, yang terdiri dari 4.666 orang (atau 43,39 %) Laki-laki, dan 6.088 orang (atau 56,61 %) perempuan. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.31.



Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Gambar 2.29
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-

masing. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun berikutnya telah mengesahkan dan sekaligus mengimplementasikan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah. Adapun perkembangan struktur organisasinya Dinas bertambah dari 10 menjadi 18, kemudian Kantor berkurang dari 6 menjadi 1, jumlah Badan tetap 5 dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 menjadi sebanyak 87.

2.1.4. Aspek Potensi Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Persentase Penduduk Kabupaten Klaten
Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2013–2017 (dalam persen)

<i>Golongan Pengeluaran</i>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40.000 – 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60.000 – 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80.000 – 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0
100.000 – 149.999	1,09	1,02	0,71	0,32	0,08
150.000 – 199.999	5,25	5,11	3,17	1,07	0,9
200.000 – 299.999	25,66	23,07	12,07	8,66	7
> 300.000	68,00	70,80	84,05	89,95	92,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100	100

Sumber: *Profil Daerah Kabupaten Klaten 2018, (diolah)*

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2017 terjadi peningkatan untuk golongan > Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan.



Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2013- 2017

Rata - rata Pengeluaran Penduduk	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	51,30	51,23	51,21	48,07	46,03
2. Non Makanan	48,70	48,77	48,79	51,93	53,97
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Klaten 2017, (diolah)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kabupaten Klaten, sebagai-berikut:

A. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dalam satuan Ha)

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.243	13	1.187	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.317	46	1.084	3.447
06 Trucuk	1.909	2	1.470	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	720	2	245	967
09 Jogonalan	1.574	1	1.095	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.042	8	647	1.697
13 Ceper	1.538	7	900	2.445

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14 Pedan	872	445	600	1.917
15 Karangdowo	2.048	69	806	2.923
16 Juwiring	2.001	12	966	2.979
17 Wonosari	2.219	14	881	3.114
18 Delanggu	1.303	1	574	1.878
19 Polanharjo	1.822	92	470	2.384
20 Karanganom	1.682	11	713	2.406
21 Tulung	1.738	467	995	3.200
22 Jatinom	604	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	809	3	631	1.443
25 Klaten Tengah	294	1	597	892
26 Klaten Utara	308	40	673	1.041
Jumlah 2017				
2016	33.111	6.581	25.684	65.556
2015	33.166	6.581	25.809	65.556
2014	33.220	6.581	25.755	65.556
2013	33.314	6.386	25.856	65.556

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

B. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prabanan	3	1	-	589	92	1312
02 Gantiwarno	2	1	-	69	12	230
03 Wedi	3	2	-	236	3	1324
04 Bayat	3	2	-	285	17	1172
05 Cawas	2	6	-	117	14	153
06 Trucuk	2	3	-	24	10	73
07 Kalikotes	1	2	-	95	15	503
08 Kebonarum	1	-	1	60	11	244
09 Jogonalan	2	2	-	74	5	263
10 Manisrenggo	2	-	-	8	8	36
11 Karangnongko	1	-	-	27	83	1097
12 Ngawen	1	2	-	42	9	212
13 Ceper	-	2	1	71	28	476
14 Pedan	1	2	-	153	19	897
15 Karangdowo	1	2	-	68	2	372
16 Juwiring	3	1	-	169	84	617
17 Wonosari	1	1	-	193	39	769
18 Delanggu	1	-	-	74	37	269
19 Polanharjo	-	1	-	81	66	634
20 Karanganom	3	1	-	234	49	1340
21 Tulung	1	5	-	287	80	1168
22 Jatinom	2	3	-	89	16	250
23 Kemalang	2	1	-	49	30	320
24 Klaten Selatan	1	-	-	64	52	501
25 Klaten Tengah	7	-	-	18	4	4
26 Klaten Utara	4	1	-	17	6	41
Jumlah 2016	50	41	2	3.193	791	14.277
2015	50	41	2	2.993	791	12.953
2014	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2013	48	39	-	2.884	790	13.749
2012	48	54	1	2.595	862	13.415

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

C. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvarh. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2017

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2017								
2016	169.113.691	878.502	141.194.438	240.824	250.644.532	1.156.967	78.135.104	67.506
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

D. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2012 sebesar 10.066.160 m³, dan pada tahun 2016 sudah mencapai 11.678.870 m³. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	40.590	12.457.190	11.235.103	8.453.618	2.437.803	40.590
2016	38.857	11.838.417	11.203.908	8.221.827	2.592.625	38.857
2015	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967	37.941
2014	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154	37.071
2013	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893	34.933

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten, 2018

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

E. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sepanjang 777 km terdiri



dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Km)

Keadaan	Status Jalan									
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
(1)	(2)			(3)			(4)			
I	Jenis Permukaan									
a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94	
b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16	
c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53	
f. Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah - I	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	777	777	769,63	
II	Kondisi Jalan									
a. Baik	3,9	5,86	9,7	25,76	18,76	17,76	550,57	381,08	470,61	
b. Sedang	29,62	24,42	22,67	15,61	6,38	7,38	86,63	206,61	169,63	
c. Rusak	-	3,24	1,15	-	2	3	-	68	62,90	
d. Rusak Berat	-	-	-	14,21	14,23	13,23	132,44	113,94	67,09	
Jumlah - II	33,52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	769,63	769,63	769,63	
III	Kelas Jalan									
a. Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41.360	-	-	-	
d. Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-	
e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	769,63	769,63	769,63	
g. Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	-	
h. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	-	
Jumlah - III	33,52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	777	777	769,63	

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017 (diolah)

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km. Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38.320 km.

Tabel 2.50
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (dalam Km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
2	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
3	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
4	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
5	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
6	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
7	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
8	Kebonharum	-	20,440	42,825	10,725
9	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735
12	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	769,630	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

F. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk Tour and Travel (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2. 51.

Tabel 2.51.
Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargedde Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi berdasarkan kelompok industri di Kabupaten Klaten tahun 2017, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2017

	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (JutaanRp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	INDUSTRI BESAR / MENENGAH				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	88	7.717	377.326.533	1.739.405.385
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	45	5.101	250.310.633	1.153.902.491
	Sub Jumlah 2017	134	12.818	627.637.166	2.893.307.876
II	INDUSTRI KECIL				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.598	71.628	545.760.452	2.276.256.721
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.074	59.526	445.648.807	1.860.555.185
	Sub Jumlah 2017	34.672	131.154	991.409.259	4.136.811.906

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, 2017

2.1.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang. Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2017	2	30	284	485	4.299	2.855	166	395	358	462	5.109	4.230
2016	17	58	244	393	3.485	2.403	155	455	283	427	4.184	3.738
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

2.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS RPJMD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

Pengukuran kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 terhadap 22 (dua puluh dua) dengan 79 (tujuh puluh sembilan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) indikator yang sifatnya progresif, dan 10 (sepuluh) indikator yang sifatnya represif diperoleh hasil sebagai berikut:

A. **Indikator Progresif** dengan hasil: (i). Sebanyak 46 (empat enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 58,23 % dengan kriteria **Sangat Baik**, (ii). Sebanyak 11 (sebelas) atau sebanyak 13,92 % dengan kriteria **Tinggi**, (iii). Sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,06% dengan kriteria **Sedang**, (iv). Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,27 % belum bisa dikreteria karena belum ada data, dan (v). Sebanyak 8 (delapan) atau sebanyak 10,13 % dengan kriteria **Sangat Rendah**. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **sangat baik**, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 46 (empat enam), diantaranya :

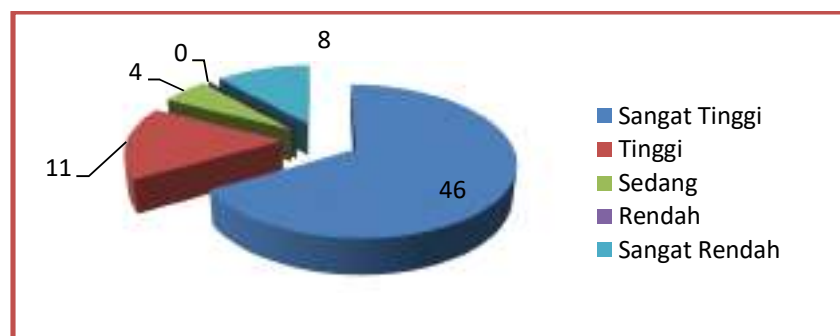
- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
- 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- 6) Angka kelulusan SD/MI
- 7) Angka kelulusan SMP/ MTs
- 8) Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya
- 9) Tingkat prestasi pemuda
- 10) Tingkat prestasi olahraga
- 11) Persentase konsistensi perencanaan
- 12) Persentase pengelolaan arsip secara baku
- 13) Skor LPPD
- 14) Indeks profesionalitas ASN
- 15) Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah
- 16) Tingkat Muturitas SPIP
- 17) Tingkat Kapabilitas APIP
- 18) Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
- 19) Indeks Kecukupan Pangan
- 20) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 21) Tingkat konsumsi ikan
- 22) Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis
- 23) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- 24) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
- 25) Persentase UMKM yang memiliki daya saing
- 26) Persentase kenaikan koperasi aktif
- 27) Persentase kenaikan nilai investasi PMDN



- 28) Persentase kenaikan nilai investasi PMA
 - 29) Persentase kenaikan kunjungan wisatawan
 - 30) Persentase kasus penyelesaian hubungan pekerja dan perusahaan tertangani
 - 31) Persentase jalan dalam kondisi baik (%)
 - 32) Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)
 - 33) Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk
 - 34) Persentase pengoperasian TPA (%)
 - 35) Tingkat keselamatan lalu lintas
 - 36) Status udara
 - 37) Lahan tutupan
 - 38) Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)
 - 39) Persentase penegakan Peraturan Daerah
 - 40) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - 41) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
 - 42) Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama
 - 43) Laju pertumbuhan penduduk
 - 44) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
 - 45) Rasio penduduk ber_akta kelahiran per satuan penduduk, dan
 - 46) Persentase peningkatan minat transmigrasi.
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja **$75,1 \leq 90$** sebanyak 11 (sebelas), diantaranya:
- 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD
 - 2) Skor LKjIP
 - 3) Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
 - 4) Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
 - 5) Persentase air minum layak
 - 6) Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak
 - 7) Rasio cakupan elektrifikasi
 - 8) Persentase penanganan RTLH
 - 9) Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 - 10) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dan
 - 11) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta.

- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja **65,1 ≤ 75** sebanyak 4 (empat), diantaranya:
- 1) Opini BPK terhadap LKPD
 - 2) Status air
 - 3) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, dan
 - 4) Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja **50,1 ≤ 65** tidak ada.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria sangat rendah, atau interval nilai realisasi kinerja **≤ 50** sebanyak 8 (delapan), diantaranya:
- 1) Persentase Kenaikan kunjungan perpustakaan
 - 2) Persentase penggunaan data statistik
 - 3) Persentase sistem berbasis informasi
 - 4) Persentase pengamanan informasi persandian
 - 5) Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan
 - 6) Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)(luasan irigasi dalam kondisi baik)
 - 7) Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan, dan
 - 8) Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Gambar 2.32.



Gambar 2.32.
Peringkat Kinerja Progresif

B. **Indikator Represif**, dengan hasil: a. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 60 % dengan kreteria **Baik (Berhasil Menekan)**, b. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 40 % dengan kreteria **Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **baik**, diantaranya:

- 1) Persentase balita gizi buruk
- 2) Angka kematian bayi
- 3) Rasio perempuan korban kekerasan
- 4) Drop out akseptor KB
- 5) Angka kematian balita
- 6) Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **tidak baik**, diantaranya:

- 1) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- 2) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan
- 4) Angka Kriminalitas

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif maka diperoleh data sebagaimana Gambar 2.31.

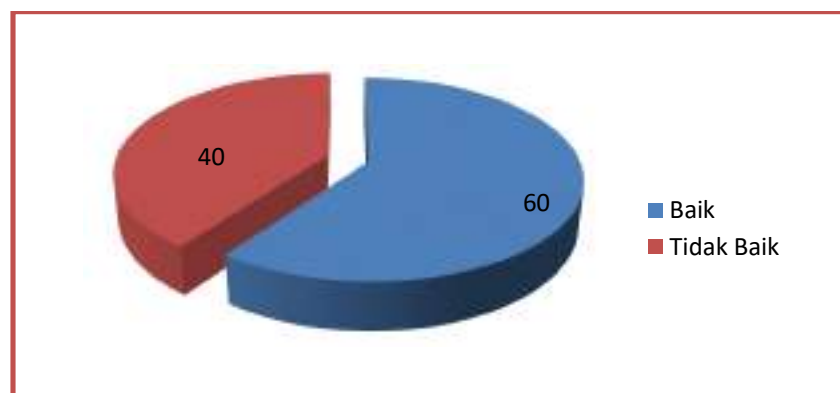


Diagram 2.33.
Peringkat Kinerja Represif

C. Disamping itu ada 1 (satu) indikator, baik target maupun realisasi masih 0 (kosong), yakni Indikator Persentase kenaikan kunjungan taman budaya.

Adapun capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2016–2021 pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2. 54.
Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,39	78,17	85
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	95,03	79,5	103
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	88,08	90,93	103
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	82,10	86,84	106
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	64,44	68,22	108
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,65	88,28	91
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,04	200
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,10	0,23	230
		Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,79	98,27	100,5
		Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,56	98,11	103
		Persentase Kenaikan kunjungan perpustakaan	%	6,75	1,24	18,44
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Persentase balita gizi buruk	%	0,74	0,73	98,65
		Angka kematian ibu melahirkan	Kasus	14	18	128,57
		Angka kematian bayi	Angka	12	10,15	84,58
		Angka kematian balita	Angka	15,8	1,69	10,70
3	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	%	55	155	281,82
		Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	%	5	0	0,00
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Tingkat prestasi pemuda	%	47	50	106,38
		Tingkat prestasi olahraga	%	36	73	202,78
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase konsistensi perencanaan	%	74	77	104,05
		Persentase penggunaan data statistik	%	92	27,2	29,57
		Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	3,61	5,62	155,62

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%
		Persentase sistem berbasis informasi	%	15	0,34	2,27
		Persentase pengamanan informasi persandian	%	62	27	43,55
		Skor LPPD	Skor	2,73	2,98	109,16
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	83	83,21	100,25
		Skor LKjIP	Skor	62	53,01	85,5
		Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	opini	0,21-0,3	1,2	400
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WDP	75
		Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	2	2,79	139,50
		Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00
7	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,76	11,70	99,49
		Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,45	91,45	100,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,75	91,90	100,16
		Tingkat konsumsi ikan	%	16,49	18,5	112,19
		Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis	%	16,42	15,76	95,98
8	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,76	35,94	103,39
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,86	17,03	90,30
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	10	10,05	100,50
		Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,30	3,05	1016,67
		Persentase kenaikan nilai investasi (%) :				
		PMDN	%	1,81	273,84	15129,28
		PMA	%	2,40	42	1750
9	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3	84,36	2811, 89
10	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	25,55	22,19	86,85
		Persentase kasus penyelesaian hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	81	100	123,46

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%
11	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	5	2,5	50,00
12	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	56,92	61,15	107,43
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	61,75	81,32	131,69
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,82	52,63	85,13
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	58,45	22,04	37,71
		Luasan irigasi dalam kondisi baik	ha	19.112	7.208	37,71
		Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,066	0,172	260,61
		Persentase pengoperasian TPA	%	26	33,33	128,19
		Tingkat keselamatan lalu lintas	%	90	99,77	110,86
13	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	Persentase air minum layak	%	90,4	84,74	93,74
		Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	93	90,80	97,63
		Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	%	52	1,18	2,27
		Rasio cakupan elektrifikasi	%	96	95	98,96
		Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	9,25	1,41	15,24
		Persentase penanganan RTLH	%	12,57	9,60	76,37
14	Peningkatan pengendalian dan penurunan kerusakan lingkungan hidup	Status udara	indeks	29	83,3	287,24
		Status air	indeks	39	18,28	63,04
		Lahan tutupan	indeks	29	42,54	146,69
15	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	1	3	300,00
16	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	91	65	71,43

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%
17	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	Angka kriminalitas	Angka	2,82	3,25	115,25
		Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	42,78	35,52	83,03
18	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan Peraturan Daerah	%	91,25	92,2	101,04
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ds/kel	401	401	100,00
19	Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	29,6	30,3	102,37
		Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	75	85	113,33
20	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,5	0,25	16,67
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,96	21,03	38,97
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	77,5	59,99	77,41
		Drop out akseptor KB	%	17	14	82,35
		Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05	1,03	98,10
21	Peningkatan pemenuhan hak anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,7	3,29	70,00
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian	%	0,1650	0,1359	82,36
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	91	92,76	101,93
		Rasio penduduk ber_akta kelahiran per satuan penduduk	%	28,56	84,95	297,44
		Persentase peningkatan minat transmigrasi	%	35	93,75	267,86

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang muncul sebagai konsekwensi untuk melaksanakan kebijakan yang sifatnya mandatori, diantaranya:

A. Kemiskinan dan Pengangguran;

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 pada kisaran 14,15% menurun dibandingkan Tahun 2016 yang berada pada kisaran 14,46%. Lambatnya kinerja penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor antara lain ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran), tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Sisi lain tingkat pengangguran di Kabupaten Klaten Tahun 2017 berada pada kisaran 4,35% mengalami kondisi stagnan dibanding Tahun 2016 yang juga berada pada kisaran 4,35%. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengangguran antara lain rendahnya kualitas angkatan kerja yang belum mampu bersaing di pasar kerja serta belum dimilikinya kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja mandiri.

B. Potensi Ekonomi Daerah;

Kabupaten Klaten memiliki potensi ekonomi daerah yang cukup besar meliputi bidang Pertanian/Perkebunan, Perdagangan, Pariwisata, Industri dan UKM serta Koperasi. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang cukup besar dan strategis, karena lebih dari 50% dari luas wilayah Kabupaten Klaten merupakan lahan pertanian produktif yang didukung sistem irigasi teknis dan sumber daya air yang memadai. Termasuk bidang perikanan, peternakan dan perkebunan juga memiliki potensi yang cukup menonjol. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala didalam pembangunan pertanian seperti ; masih rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, penerapan pola tanam yang belum tepat sesuai dengan ketentuan, keterbatasan infrastruktur pertanian, masih lemahnya SDM dan



kelembagaan tani, masih adanya alih fungsi lahan pertanian, adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menurunnya kesuburan tanah, masih kurangnya penggunaan benih unggul yang bersertifikasi atau berlabel, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi perikanan serta peternakan, belum berkembangnya potensi komoditas tanaman perkebunan. Untuk sektor perdagangan potensi yang dimiliki antara lain pasar (tradisional dan modern), Pedagang Kaki Lima, Kuliner dan jasa lainnya. Meskipun memiliki potensi perdagangan yang cukup besar, namun demikian juga masih perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan serta ditata sesuai dengan kawasan peruntukannya, agar dapat lebih memiliki daya tarik dan daya saing serta mendukung peningkatan produktifitas ekonomi wilayah dan perkotaan. Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor kepariwisataan, namun demikian sampai saat ini pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Klaten masih belum terintegrasi antar sektor dan wilayah, serta kurang memperhatikan aspek industri pariwisata, destinasi wisata, promosi/pemasaran pariwisata serta kelembagaan pariwisata. Sehingga mengakibatkan pengembangan kepariwisataan daerah menjadi belum optimal dan masih belum memiliki daya tarik dan daya saing kepariwisataan. Sektor industri (Industri Kecil Menengah) dan UKM juga memiliki potensi yang besar dan tersebar di 26 kecamatan. Saat ini pola yang dilakukan dalam pemberdayaan IKM dan UKM melalui pola pendekatan Klaster. Terdapat 11 Klaster yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati meliputi: Klaster Lurik, Batik, Konveksi, Logam, Mebel, Keramik, Makanan Olahan, Desa Wisata, Minapolitan, Lereng Merapi dan Handycraft. Namun demikian potensi tersebut dalam implementasinya masih banyak ditemukan berbagai kendala, yaitu antara lain masih minimnya IKM dan UKM yang memiliki daya saing, masih lemahnya akses terhadap sumberdaya produktif (lahan, modal, pasar, informasi, teknologi dan bahan baku), dan masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan, serta belum berkembangnya usaha IKM dan UKM yang berbasis pada ekonomi kreatif.

Potensi dan perkembangan koperasi juga cukup besar yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Namun dalam perkembangannya koperasi yang

tidak aktif masih cukup besar sekitar 30% - 40% termasuk masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kesehatan manajemen koperasi. Pertumbuhan dan perkembangan di bidang investasi serta penanaman modal belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kebijakan yang pro investasi maupun peningkatan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

C. Infrastruktur dan Kesenjangan Antar Wilayah;

Infrastruktur menjadi faktor dominan dan strategis sebagai upaya untuk mendukung daya saing daerah. Beberapa permasalahan pembangunan infrastruktur adalah:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana permukiman dan utilitas, seperti jalan dan jembatan, drainase, sanitasi, air minum, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum dan jaringan irigasi.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan dan pengendalian tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
3. Belum optimalnya langkah strategis dan menyeluruh dalam menuju akses universal (100 persen akses air minum; 0 persen kawasan kumuh; 100 persen akses sanitasi)
4. Masih perlu adanya dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kualitas dan konektivitas infrastuktur antar wilayah serta antar kewenangan.

D. Pendidikan dan Kesehatan;

Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor dominan dan strategis sebagai upaya untuk mendukung peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan pembangunan urusan pendidikan dan kesehatan, diantaranya:

1. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana yang belum merata.



2. Belum perkembangannya pendidikan budi pekerti sebagai basis pendidikan formal, maupun pendidikan informal dan non formal yang berkarakter.
3. Tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi;
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan masih banyaknya penduduk miskin yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
5. Masih adanya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan serta pola hidup tak sehat dan pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani.

E. Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

Berbagai permasalahan implementasi roadmap reformasi birokrasi masih ditemui adanya hambatan sosiologis terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga untuk mewujudkan good government dan good governance perlu adanya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

F. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam;

Permasalahan pokok pada sektor lingkungan hidup antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah;
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Kurangnya ruang terbuka hijau publik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Kerawanan lain di Kabupaten Klaten seperti banjir, tanah longsor dan angin ribut.

G. Pangan dan Energi.

Sekalipun Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penyangga pangan tetap saja menghadapi permasalahan kemandirian dan kedaulatan pangan. Sehingga diperlukan komitmen dan dukungan program yang mengarah pada ketahanan pangan, termasuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah lestari) dan pengembangan keanekaragaman pangan serta diversifikasi pangan. Dari sektor energi, perlu adanya peningkatan

pemanfaatan energi alternatif, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi, serta optimalisasi pengelolaan energi terbarukan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis

Berbagai permasalahan berdasarkan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 diantaranya:

1. Sasaran Strategis Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:
 - a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah;
 - b. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1);
 - c. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
 - d. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan
 - e. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruoping.

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

- 1). Perlunya peningkatan kualitas pamong belajar untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri;
 - 2). Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan
 - 3). Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan.
2. Sasaran Strategis Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:
 - a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
 - b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - Demam berdarah dengue .
 - Malaria
 - Filariatis

- c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
- Penyakit menular Tuberculosis paru
 - Kusta penderita PB
 - Diare
 - Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - HIV
 - Kejadian luar biasa KIPI
- d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.
- Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:
- 1). Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
 - 2). Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan antenatal care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.
3. Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan, dengan permasalahan, diantaranya:
- a. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman;
 - b. Belum optimalnya promosi budaya daerah, serta belum efektifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah; dan
 - c. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual).
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :



- 1). Peningkatan pelestarian sejarah dan permuseuman melalui penguatan kebijakan daerah;
 - 2). Peningkatkan promosi budaya daerah, dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah; dan
 - 3). Fasilitasi perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).
4. Sasaran Strategis Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dengan permasalahan, diantaranya:
- a. Belum adanya pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;
 - b. Belum optimalnya prestasi keolahragaan karena belum memadainya pemihakan anggaran dari pemerintah daerah;
 - c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga;
 - d. Belum optimalnya pembinaan olahraga bagi atlet difabel; dan
 - e. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta masih lemahnya manajemen dan pemasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Peningkatan pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;
 - 2). Peningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga; dan
 - 3). Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta pemasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.
5. Sasaran Strategis Urusan Statistik dengan permasalahan, diantaranya:
- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
 - b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang kredibel.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan



- 2). Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.
6. Sasaran Strategis Pelaksanaan Kepengawasan menghadapi masalah:
- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
 - b. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
 - c. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Penguatan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindaklanjut pengawasan;
 - 2). Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan
 - 3). Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Sasaran Strategis Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
 - b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;
 - c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
 - d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi



kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk-produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;

- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari;
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani; dan
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
 - 2). Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;
 - 3). Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
 - 4). Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk-produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
 - 5). Penciptaan sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.
8. Sasaran Strategis Urusan Perdagangan dan Perindustrian menghadapi permasalahan, diantaranya:



- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.
- g. Belum berkembangnya Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah);
- h. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil, Menengah;
- i. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- j. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- k. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
- l. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
- m. Belum semua IKM mebel memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan
- n. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- 2). Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- 3). Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 4). Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- 5). Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan



- 6). Penataan dan pemberdayaan PKL.
 - 7). Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah);
 - 8). Peningkatan profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil, Menengah;
 - 9). Penyadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
 - 10). Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk;
 - 11). Penguatan jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
 - 12). Fasilitasi IKM mebel agar memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan
 - 13). Pengembangan produk berorientasi ekspor.
9. Sasaran Strategis Urusan Pariwisata menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilakukan, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan kecil;
 - b. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya;
 - c. Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata; dan
 - d. Belum optimalnya sinergisitas antara produk pariwisata, produk industri dan UKM unggulan, penyedia jasa, hotel dan restoran.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Pengembangan promosi untuk peningkatan: jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan; dan
 - 2). Peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata, sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.



10. Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
 - b. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
 - c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
 - d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
 - e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
 - f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
 - g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
 - h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
 - i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
 - j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
 - k. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.
Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
 - 2). Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
 - 3). Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
 - 4). Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
 - 5). Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
 - 6). Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
 - 7). Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
 - 8). Merintis database ketenagakerjaan secara online.
11. Sasaran Strategis urusan penelitian dan pengembangan daerah menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Belum optimalnya perencanaan berbasis hilirisasi hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat; dan
 - b. Masih rendahnya pemihakan kebijakan dan penganggaran untuk pengembangan produk pengembangan daerah.
- Rumusan solusi permasalahannya adalah perlu adanya skala prioritas penerapan hasil kreatifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
12. Sasaran Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;



- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
 - 2). Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
 - 3). Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
 - 4). Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 5). Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
 - 6). Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.
13. Sasaran Strategis Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;



- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- 2). Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- 3). Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- 4). Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

14. Sasaran Strategis Urusan lingkungan hidup menghadapi permasalahan, diantaranya:

- a. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya;
- b. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
- c. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- d. Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu;
- e. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
- f. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan); dan
- h. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Peningkatan kapasitas dan kualitas lahan terbuka hijau (RTH);
- 2). Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan;
- 3). Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;



- 4). Pengendalian pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
 - 5). Akseklarasi penyediaan dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bagi kegiatan industri atau kegiatan usaha; dan
 - 6). Penekanan bagi perusahaan/kegiatan industri untuk memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).
15. Sasaran Strategis Penanganan Bencana menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Masih rendahnya perencanaan berbasis migasi bencana; dan
 - b. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu;
 - 2). Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.
16. Sasaran Strategis Pengendalian Ruang menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;
 - d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
 - f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :



- 1). Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - 2). Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - 3). Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
 - 4). Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
17. Sasaran Strategis Urusan Ketertiban dan Keamanan menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
 - b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
 - c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan
 - d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.
Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
 - 1). Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
 - 2). Peningkatan kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan
 - 3). Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.
18. Sasaran Strategis Penegakan Peraturan Daerah menghadapi permasalahan, diantaranya:
- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
 - b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
 - c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan
 - d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- 2). Peningkatan kualitas pembinaan aparaturnya penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan
- 3). Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

19. Sasaran Strategis hubungan intern dan antar umat beragama menghadapi permasalahan, diantaranya:

- a. Masih adanya paham radikalisme yang akan menjadi ancaman terciptanya kondusivitas daerah; dan
- b. Tingginya mobilitas penduduk, dan masih rendahnya kualitas politik masyarakat akan menjadi ancaman keamanan dan kenyamanan lingkungan;

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai paham yang mengakibatkan ancaman toleransi keberagaman masyarakat;
- 2). Peningkatan kualitas pembinaan intern dan antar umat beragama; dan
- 3). Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

20. Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menghadapi permasalahan, diantaranya:

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :

- 1). Peningkatan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak;
- 2). Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 3). Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- 4). Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

21. Sasaran Strategis Pelayanan Publik yang tepat waktu, mutu dan manfaat menghadapi permasalahan, diantaranya:



- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
 - b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
 - c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.
- Rumusan pemecahan permasalahannya, antara lain :
- 1). Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
 - 2). Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Secara lengkap identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan sasaran strategis dan pemecahan serta dukungan program prioritas disajikan dalam Tabel 2.55.

Tabel 2.55

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis dan Pemecahan serta dukungan Program Prioritas

No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan	a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah; b. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); c. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; d. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan e. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruoping.	1. Perlunya peningkatan kualitas pamong belajar untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri; 2. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan 3. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun; 3) Program Pendidikan Non Formal; 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2	Kesehatan	a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi; b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang antara lain DBD, malaria, filariatis. c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini antara lain tuberculosis paru, kusta, diare, HIV.	1. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan 2. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan antenatal care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil	1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8) Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk;</p> <p>e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;</p> <p>f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan</p> <p>g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.</p>		
3	Kebudayaan	<p>a. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman;</p> <p>b. Belum optimalnya promosi budaya daerah, serta belum efektifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah; dan</p> <p>c. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual)</p>	<p>1. Peningkatan pelestarian sejarah dan museum melalui penguatan kebijakan daerah;</p> <p>2. Peningkatkan promosi budaya daerah, dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah; dan</p> <p>3. Fasilitasi perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI)</p>	<p>1) Program Pengembangan Nilai Budaya</p> <p>2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</p> <p>3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</p>
4	Kepemudaan dan Olahraga	<p>a. Belum adanya pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;</p> <p>b. Belum optimalnya prestasi keolahragaan karena belum memadainya pemihakan anggaran dari pemerintah daerah;</p> <p>c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga;</p> <p>d. Belum optimalnya pembinaan olahraga bagi atlet difabel; dan</p>	<p>1. Peningkatan pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;</p> <p>2. Peningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga; dan</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta pemyasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.</p>	<p>1) Program peningkatan peran serta kepemudaan</p> <p>2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</p> <p>3) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>4) Program Pembinaan dan Pemyasyarakatan Olah Raga</p> <p>5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		e. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta masih lemahnya manajemen dan pemasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.		6) Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
5	Statistik	a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang kredibel.	1. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan 2. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah
6	Pengawasan	a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan; b. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan c. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola	1. Penguatan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindaklanjut pengawasan; 2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan 3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.	1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 3) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
7	Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan; b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya	1. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan; 2. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan	1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;</p> <p>c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);</p> <p>d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk-produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;</p> <p>e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari;</p> <p>g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;</p> <p>h. Belum optimalnya sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani; dan</p> <p>i. Belum terciptanya sinergitas antar Satker dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan</p>	<p>intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;</p> <p>3. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);</p> <p>4. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk-produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan</p> <p>5. Penciptaan sinergitas antara program – program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani</p>	<p>6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</p> <p>7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</p> <p>8) Program peningkatan produksi hasil peternakan</p> <p>9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</p> <p>10) Program peningkatan produksi peternakan</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Perdagangan dan Perindustrian	<p>a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;</p> <p>b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;</p> <p>c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;</p> <p>d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;</p> <p>e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan</p> <p>f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.</p> <p>g. Belum berkembangnya Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah);</p> <p>h. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil, Menengah;</p> <p>i. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;</p> <p>j. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;</p> <p>k. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;</p> <p>l. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;</p>	<p>1. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;</p> <p>2. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;</p> <p>3. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;</p> <p>4. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;</p> <p>5. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan</p> <p>6. Penataan dan pemberdayaan PKL.</p> <p>7. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis IKM (industri kecil menengah);</p> <p>8. Peningkatan profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil, Menengah;</p> <p>9. Penyadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;</p> <p>10. Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk;</p> <p>11. Penguatan jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;</p> <p>12. Fasilitasi IKM mebel agar memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan</p>	<p>1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>3) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</p> <p>4) Program pengembangan industri kecil dan menengah</p> <p>5) Program peningkatan kemampuan teknologi industri</p> <p>6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		m. Belum semua IKM mebel memiliki SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu); dan n. Terbatasnya produk berorientasi ekspor	13. Pengembangan produk berorientasi ekspor	
9	Pariwisata	a. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilakukan, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan kecil; b. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya; c. Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata; dan d. Belum optimalnya sinergisitas antara produk pariwisata, produk industri dan UKM unggulan, penyedia jasa, hotel dan restoran.	1. Pengembangan promosi untuk peningkatan: jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan; dan 2. Peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata, sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya.	1) Program pengembangan pemasaran pariwisata. 2) Program pengembangan destinasi pariwisata. 3) Program pengembangan Kemitraan.
10	Tenaga Kerja	a. Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;	1. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan; 2. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang	1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>b. Peluang kerja yang relatif belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;</p> <p>c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;</p> <p>d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;</p> <p>e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;</p> <p>f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;</p> <p>g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;</p>	<p>kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;</p> <p>4. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;</p> <p>5. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;</p> <p>6. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;</p> <p>7. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan</p> <p>8. Merintis database ketenagakerjaan secara online</p>	



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; j. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan k. Belum tersedianya database ketenagakerjaan 		
11	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya perencanaan Belum optimalnya perencanaan berbasis hilirisasi hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat; dan b. Masih rendahnya pemihakan kebijakan dan penganggaran untuk pengembangan produk pengembangan daerah. 	Perlu adanya penerapan hasil kreatifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah	1) Program Penelitian dan Pengembangan.
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku; c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase); d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan; 2. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku; 3. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase); 4. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah; 5. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program pembangunan jalan dan jembatan 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan</p> <p>f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi</p>	<p>pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan</p> <p>6. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi</p>	<p>8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</p> <p>9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <p>10) Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan</p> <p>11) Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung</p> <p>12) Program Penataan Trotoar Jalan</p>
13	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<p>a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;</p> <p>b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;</p> <p>c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;</p> <p>d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan</p> <p>e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.</p>	<p>1. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;</p> <p>2. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;</p> <p>3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan</p> <p>4. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR</p>	<p>1) Program Pengembangan Perumahan.</p> <p>2) Program Lingkungan Sehat Perumahan.</p> <p>3) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.</p>
14	Lingkungan Hidup	<p>a. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya;</p> <p>b. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan;</p> <p>c. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;</p> <p>d. Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu;</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas dan kualitas lahan terbuka hijau (RTH);</p> <p>2. Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan;</p> <p>3. Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;</p> <p>5. Akseklarasi penyediaan dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai</p>	<p>1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>

No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>e. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;</p> <p>f. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>g. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan); dan</p> <p>h. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL)</p>	<p>Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) bagi kegiatan industri atau kegiatan usaha; dan</p> <p>6. Penekanan bagi perusahaan/kegiatan industri untuk memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL)</p>	<p>5) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>6) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.</p>
15	Penanganan Bencana	<p>a. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan</p> <p>b. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.</p>	<p>1. Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu;</p> <p>2. Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.</p>	<p>1) Program Pengendalian Banjir.</p> <p>2) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>3) Program Penanganan Darurat Bencana</p>
16	Pengendalian Ruang	<p>a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;</p> <p>c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;</p>	<p>1. Optimalisasi Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;</p> <p>3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan</p> <p>4. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana</p>	<p>1) Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;</p> <p>e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan</p> <p>f. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</p>	<p>detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.</p>	
17	Ketertiban dan Keamanan	<p>a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;</p> <p>b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparaturnya penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan</p> <p>d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.</p>	<p>1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;</p> <p>2. Peningkatan kualitas pembinaan aparaturnya penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan</p> <p>3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.</p>	<p>1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>3) Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p> <p>6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</p> <p>7) Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik</p> <p>8) Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran</p>
18	Penegakan Peraturan Daerah	<p>a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;</p> <p>b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;</p>	<p>1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;</p> <p>2. Peningkatan kualitas pembinaan aparaturnya penanggulangan bencana alam</p>	<p>1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;</p> <p>2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;</p>



No	Sasaran Strategis	Permasalahan	Pemecahan	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparaturnya penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan d. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.	dan manajemen penanganan bencana; dan 3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.	3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
19	Hubungan Intern dan Antar Umat Beragama	a. Masih adanya paham radikalisme yang akan menjadi ancaman terciptanya kondusivitas daerah; dan b. Tingginya mobilitas penduduk, dan masih rendahnya kualitas politik masyarakat akan menjadi ancaman keamanan dan kenyamanan lingkungan.	1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai paham yang mengakibatkan ancaman toleransi keberagaman masyarakat; 2. Peningkatan kualitas pembinaan intern dan antar umat beragama; dan 3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia	1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3) Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik.
20	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak; b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai	1. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak; 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan 4. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak	1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
21	Pelayanan Publik	a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan. b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas	1. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan 2. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas	1) Program Penataan Administrasi Kependudukan



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan sekaligus proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun tersebut dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi Kabupaten Klaten, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai Kerangka Ekonomi Daerah tersebut, perlu disusun berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan strategis guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

3.1.1. KONDISI EKONOMI

A. Kondisi Ekonomi Nasional

Perkembangan perekonomian global terus menunjukkan kinerja positif, dan berdampak pada ekonomi domestik. Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 dan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,4 – 5,8 persen, dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Memperhatikan kondisi ini, maka untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi direncanakan pada besaran 2,5 – 4,5 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu akan mengurangi angka kemiskinan menjadi 7,0 – 8,0 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4-5 persen.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan



pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan prioritas pada upaya pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa tengah yang berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap.

B. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Surakarta

Perkembangan perekonomian global dan nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif diharapkan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional Jawa Tengah, sehingga berpotensi tumbuh lebih tinggi pada tahun 2019. Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28% dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Hal ini ditunjang adanya permintaan sektor tersier seperti kontruksi, telekomunikasi dan jasa keuangan diimbangi adanya permintaan domestik dan sektor pertanian.

Laju inflasi Jawa Tengah pada semester II 2016 (2,36%) atau mengalami penurunan dibanding pada periode yang sama tahun 2015 (2,73%). Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah kelompok bahan makan dan makanan jadi serta bahan bakar. Adapun penyebab terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga sebesar 1,85%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,70%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,34%; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%, kesehatan sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,05% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,02%.

Kondisi kesejahteraan masyarakat membaik. Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih diatas rata-rata nasional sebesar 10,64% akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan nasional (0,39/tahun untuk

Jawa Tengah dibanding 0,26%/tahun untuk Nasional dalam periode 2013-2017). Sedangkan untuk pengangguran telah menunjukkan progres yang semakin baik ditunjukkan dengan penurunan persentase TPT dari 4,63% tahun 2016 menjadi 4,57% pada tahun 2017. Berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat, sekalipun kualitas penduduk yang bekerja belum mengalami perbaikan karena tenaga kerja yang terserap didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah).

Sementara itu, Perekonomian wilayah Eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2016 diantara kabupaten/kota di wilayah eks. Karesidenan Surakarta (Soloraya), diperkirakan berkisar pada angka 5,2% - 5,6%. Angka ini diperkirakan akan lebih baik dibanding capaian nasional (tumbuh 5,0%). Begitu juga angka laju inflasi tercatat sebesar 2,85% (yoy), dan secara tahun kalender tercatat sebesar 1,84% (ytd).

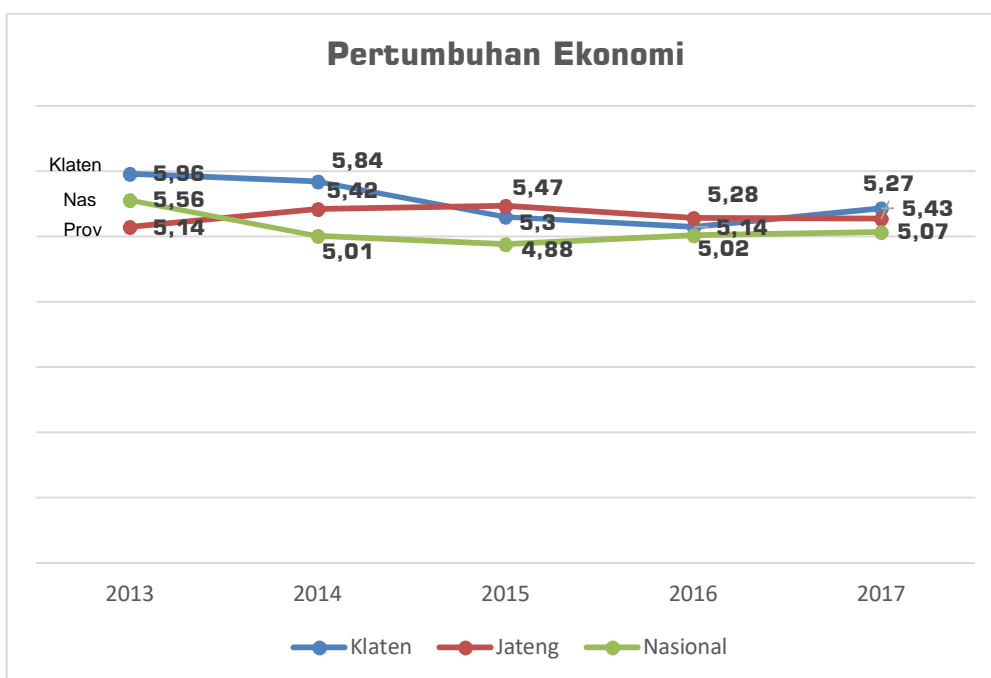
Capaian indikator ekonomi ini didukung adanya pengendalian, dan keterkaitan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam mendukung kinerja ekonomi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Eks. Karesidenan Surakarta pada tahun 2018 juga diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2017, yaitu akan tumbuh pada kisaran 5,4 - 5,7% dengan kecenderungan bias ke atas. Sejauh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian dan konstruksi masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

C. Kondisi Ekonomi Kabupaten Klaten

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,96%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,84%). Hal ini sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional. Sedangkan laju pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,14 % sedikit melambat dibanding tahun 2015 yang tumbuh pada kisaran 5,30%, sedangkan pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh 5,43%. Perbandingan

pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

Gambar 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2013-2017 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah dan Persentase Kenaikan)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,583,620.33	4.56	2,606,035.81	0.87	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99	2,904,968.43	3.23
2	Pertambangan dan Penggalian	557,451.35	6.45	597,551.15	7.19	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89	655,048.62	3.12
3	Industri Pengolahan	6,506,551.46	8.60	7,093,268.56	9.02	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10	8,512,688.47	6.39
4	Pengadaan Listrik dan gas	37,301.57	7.98	38,526.20	3.28	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20	44,285.67	6.49
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,062.16	3.46	11,527.87	4.21	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16	12,329.79	2.34
6	Konstruksi	1,254,970.42	4.65	1,294,690.29	3.17	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87	1,524,516.17	6.17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,000,471.06	2.24	4,094,285.55	2.35	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55	4,524,466.66	3.81
8	Transportasi dan Pergudangan	469,346.14	10.63	515,457.41	9.82	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07	591,419.85	4.35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755,159.55	2.91	792,087.87	4.89	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06	939,352.83	6.35
10	Informasi dan Komunikasi	749,129.31	3.72	794,978.71	6.12	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51	978,651.68	7.76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,611.17	5.94	718,614.58	6.37	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25	885,144.74	7.51
12	Real Estate	290,530.05	6.80	316,062.61	8.79	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17	384,178.64	6.46%
13	Jasa Perusahaan	60,535.96	18.84	65,626.24	8.41	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19	84,732.87	9.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543,501.77	2.39	546,822.57	0.61	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96	610,742.42	3.19
15	Jasa Pendidikan	1,193,988.37	10.03	1,333,544.38	11.69	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61	1,608,872.35	5.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200,873.15	9.90	224,011.39	11.52	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80	280,985.79	8.04
17	Jasa Lainnya	351,325.20	10.03	381,431.17	8.57	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96	463,430.04	8.20
Produk Domestik Regional Bruto		20,241,429.02	5.96	21,424,522.36	5.84	22,558,976.13	5.30	23,717,931.01	5.14	25,055,815.01	5.43

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat. Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis di antara Yogyakarta-Surakarta, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Upaya strategis dan regulasi yang adaptif diharapkan terbentuk, sehingga eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam terjadi secara bijaksana dan memberikan dampak yang positif dan relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang adaptif dengan kondisi lokal. Disamping itu, struktur ekonomi sekunder dan tersier diperkirakan akan meningkat pada tahun 2019 mendatang sebagai akibat dari berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.

Namun beberapa peluang tersebut masih dihadapkan dengan beberapa kendala, antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten khususnya bagi UKM;
2. Masih rendahnya daya saing produk UKM
3. Ketergantungan bahan bakar impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
4. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;
5. Belum optimalnya tata kelola ekonomi daerah
6. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

Mengingat kondisi-kondisi analisa strategis tersebut, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit (di atas 10%), (iii) Menekan laju



pertumbuhan penduduk. dan (iv) Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah. Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada *track* yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis. Adapun gambaran perkembangan Indikator makro ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan asumsi tahun 2018 dapat disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator dan Proyeksi Makro Ekonomi
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

No	Indikator	Realisasi		Asumsi 2018**)
		2016	2017*)	
1	PDRB			
	Atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	31.558.691,06	34.990.172,73	38.794.770,89
	Atas dasar harga konstan (Juta Rp.)	23.717.931,02	25.005.815,01	26.492.268,28
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,43	5,44
3	Tingkat Inflasi (%)	2,31	3,12	3,00
4	Tingkat Kemiskinan (%)	14,46	13,98	13,41
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,35	4,13	3,94

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan trend perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Klaten maupun ekonomi nasional, maka sasaran makro pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi, yang diproyeksikan pada kisaran 5,4-5,5%;
- b. Tingkat Kemiskinan, yang diharapkan menurun pada kisaran 13,41%;
- c. Laju Inflasi, diproyeksikan pada kisaran 2,3%-2,5%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diharapkan turun menjadi kisaran 4,13%; dan
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diharapkan mencapai angka sebesar 75,45%.

Dalam rangka mencapai kondisi ekonomi daerah yang ingin dicapai, maka dirumuskan beberapa strategi, antara lain :

1. Memacu pembangunan infrastruktur wilayah yang mengarah pada akses-akses menuju pusat-pusat ekonomi baik industri, perdagangan dan pariwisata;



2. Melakukan peninjauan kembali pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah seperti penetapan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan hijau;
3. Meningkatkan sarana prasarana utilitas umum yang mampu menjadi daya tarik utama bagi masyarakat umum dan bagi calon investor maupun dunia usaha.
4. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang tetap mempertimbangkan aspek dampak lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk barang/jasa yang mampu bersaing di pasar global serta membuka akses-akses pemasaran produk;
6. Menciptakan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah yang mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kreatif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah agar tercapai hasil dan daya-guna dalam penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja, maka aspek yang menjadi landasan antara lain efektif; efisien; prioritas; perspektif; investasi; berimbang; dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu faktor yang menjadi indikator kemajuan daerah adalah daerah mampu menciptakan kesinambungan fiskal dan kemandirian fiskal, hal ini sangat terkait dengan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembiayaan yang bersumber dari potensi yang dimiliki. Optimalisasi potensi akan membawa arah terciptanya kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung dapat dirasakan manfaat sepenuhnya oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Kebijakan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari 3 sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kondisi pendapatan daerah Kabupaten Klaten masih didominasi dari Pos Dana Perimbangan. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah demi terciptanya kemandirian keuangan daerah, melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui upaya-upaya:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak;
- b. mengupayakan dan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan baik pajak dan redistribusi daerah maupun sumber pendapatan lainnya;
- c. inventarisasi, optimalisasi dan revitalisasi aset daerah;
- d. optimalisasi kinerja BUMD;
- e. penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak dengan melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan;
- f. meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif;

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi dari faktor-faktor antara lain kebijakan pemerintah pusat serta peningkatan kinerja dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Pendapatan daerah tahun 2017 mencapai Rp.2.580.619.677.724,- (*Anaudited*) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.322.015.047.119,- atau sebesar 14,37% dari tahun 2016 sebesar Rp.2.258.604.630.605,-. Sedangkan tahun 2018 diasumsikan sebesar Rp.2.512.253.142.500,- dan pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.2.712.769.980.604,-. Adapun rincian realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2019 digambarkan pada tabel 3.3.



Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019 (dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019
		2016	2017 *)		
1	PENDAPATAN	2.258.604.630	2.580.619.677	2.512.253.142	2.775.816.775
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224.197.408	370.822.821	354.566.542	395.168.514
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747	105.290.677	100.232.189	115.325.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.559.038	12.668.781	14.797.502	13.652.447
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.025.861	9.742.870	9.827.999	17.082.855
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.037.730	243.120.491	229.708.852	249.108.212
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.573.615.108	1.624.715.625	1.679.025.419	1.792.676.497
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.275.933	50.852.354	46.839.153	47.289.153
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586	1.271.590.067	1.237.967.327	1.268.916.510
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589	302.273.202	394.218.939	476.470.834
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.792.113	585.081.231	478.661.181	585.721.764
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	942.739	4.580.000	2.250.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	143.325.208	171.067.103	152.560.887	152.560.887
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	73.600.480	46.337.071	-	112.220.284
1.3.7	Dana Desa	243.866.425	311.087.446	321.520.294	320.940.593

Sumber : BPKD & Bappeda Kab. Klaten, 2018 (diolah)

Keterangan : *) Realisasi APBD Tahun 2017 Unaudited

**) APBD Tahun 2018

Secara prosentase, pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 dan proyeksi Tahun 2019 dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Prosentase Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 dan Proyeksi 2019 (dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019
		2016	2017 *)		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.93%	14.37%	14.11%	14,24%
1.2	DANA PERIMBANGAN	69.67%	62.96%	66.83%	64.58%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.40%	22.67%	19.05%	21.18%
PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3)		100 %	100%	100%	100%

Sumber : BPKD Kab. Klaten, 2018,

Keterangan : *) Realisasi APBD Tahun 2017 Unaudited

**) APBD Tahun 2018

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan merupakan hal yang berpotensi menjadi persoalan apabila terjadi fluktuasi pendapatan negara sebagai akibat pengaruh global. Harga minyak mentah dunia



yang mencapai di atas US\$ 100/barrel di pasaran dunia dan krisis keuangan global akan berdampak terhadap postur APBN 2019. Kondisi seperti ini akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Apabila asumsi ini benar-benar terjadi maka bisa jadi kontribusi Dana Perimbangan dalam struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 akan terjadi penurunan atau minimal sama dengan tahun 2018.

Mendasarkan data-data di atas pada tahun 2019 kontribusi PAD masih berada pada kisaran antara 14,24 % sedangkan kontribusi Dana Perimbangan berkisar antara 64,58 %, serta kontribusi Lain-lain Pendapatan berkisar antara 21,18 % dalam struktur APBD.

Dengan demikian peran PAD Kabupaten Klaten sangat diharapkan mampu mengamankan APBD, dan diperlukan optimalisasi sumber-sumber pendanaan di luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia swasta/usaha (*public private partnership*), kemitraan dengan masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat dan sebagainya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya baik PMA maupun PMDN dalam skala luas. Deregulasi kebijakan-kebijakan daerah yang mengarah pada pemberian insentif, kesiapan dan sinergisitas antar organisasi perangkat daerah serta langkah jemput bola pemerintah daerah kepada dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi tersebut.

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pola penyusunan anggaran di Kabupaten Klaten mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Klaten kurun waktu 2016-2018 rata-rata mengalami kenaikan 7-8 % per tahun. Kenaikan tersebut dikarenakan dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

sebagaimana pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terbentuknya perangkat daerah baru.

Mendasarkan pada permasalahan pokok Kabupaten Klaten, serta mendasarkan isu strategis yang ada, maka diprediksikan akan terjadi fluktuasi belanja daerah untuk tahun 2018. Mempertimbangkan kondisi yang demikian, dalam rangka pengelolaan belanja daerah maka perlu ditempuh kebijakan-kebijakan, antara lain:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Alokasi anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Besaran alokasi belanja daerah Kabupaten Klaten pada setiap tahun sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dari pos pendapatan daerah, dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif minim dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas menjadi suatu keharusan yang wajib ditempuh agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan yang selaras dengan tema dan prioritas pembangunan daerah.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.199.794.918.719,- *) (*anaudited*) atau mengalami kenaikan sebesar 8.75% dari tahun 2016 sebesar Rp.2.282.330.771.499,- yaitu sebesar Rp.2.482.125.690.218,- *) (*anaudited*). Sedangkan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.2.656.503.142.500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.174.377.452.282,- *) (*anaudited*) atau mengalami kenaikan sebesar 7.03% dari tahun 2017. Adapun rincian realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Tahun 2016 – 2017 serta proyeksi dan asumsi tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019 (dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019***)
		2016	2017 *)		
2	BELANJA	2.282.330.771	2.482.125.690	2.656.503.142	2.960.816.775
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.780.715.488	1.963.456.168	1.846.597.441	1.557.893.662
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884	1.032.184.118	1.161.909.785	1.058.370.563
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055	48.124.969	55.987.450	24.943.283
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425	1.149.725	2.485.200	2.485.200
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321	9.970.076	11.395.502	12.897.744
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747	625.433.403	611.819.504	456.196.871
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	-	3.000.000	3.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	501.615.283	765.263.396	809.905.701	1.402.923.112
2.2.1	Belanja Pegawai	27.421.377	60.119.848	77.712.564	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.434.818	339.944.350	414.653.337	
2.2.3	Belanja Modal	220.759.087	365.199.198	317.539.798	

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2018

Keterangan : *) Realisasi APBD Tahun 2017 Unaudited

**) APBD Tahun 2018

***) Proyeksi Tahun 2019

Belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority* dan memperhatikan pendekatan *money*



follow function serta mendasari prioritas pembangunan daerah sesuai permasalahan dan isu strategis yang disusun secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Untuk itu perlu disusun arah-arah prioritas belanja daerah, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung;

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung diarahkan pada :

- a. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja yang bersifat mengikat yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan dengan jumlah yang cukup;
- b. Belanja hibah, diprioritaskan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bantuan sosial, diprioritaskan dalam rangka untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemenuhan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang menjadi kewajiban daerah yaitu terkait bagi hasil pajak dan restribusi.
- e. Bantuan keuangan, diprioritaskan dalam rangka meningkatkan keselarasan pembangunan daerah dan mengatasi kesenjangan antar wilayah yang berskala lokal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat di tingkat desa serta dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung diarahkan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada urusan pemerintahan yang wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan serta mendukung prioritas pembangunan daerah;
- b. Memenuhi kebutuhan belanja program dan kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat dalam rangka pemenuhan layanan dasar masyarakat;



- c. Memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait alokasi prosentase belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- d. Alokasi anggaran belanja program kegiatan yang direncanakan pada setiap Perangkat Daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan rasional.
- e. Mengakomodir usulan-usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang dijangkau melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang kemudian diselenggarakan dalam forum perangkat daerah.

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan struktur yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus cadangan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah perlu dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pemanfaatan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kebijakan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang ditetapkan mendasari dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan.

Strategi pembiayaan daerah tahun 2019 diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan produk barang dan jasa hasil produk lokal serta penguatan kemampuan keuangan daerah sebagai manfaat dari pembiayaan daerah.

Secara lengkap realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dijabarkan dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019 (dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019***)
		2016	2017 *)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	406.262.095	375.166.439	155.250.000	200.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	406.198.863	375.166.439	155.250.000	200.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.231	-	-	-

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019***)
		2016	2017 *)		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.304.000	18.200.000	11.000.000	15.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000	13.200.000	3.000.000	5.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	397.958.095	356.966.439	144.250.000	185.000.000

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2018

Keterangan : *) Realisasi APBD Tahun 2017 Unaudited

***) APBD Tahun 2018

***) Proyeksi Tahun 2019

3.2.4. RINGKASAN KEUANGAN DAERAH

Secara keseluruhan ringkasan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat digambarkan secara rinci pada tabel 3.7. di bawah ini:

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2019 (dalam ribuan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019
		2016	2017 *)		
1	PENDAPATAN	2.258.604.630	2.580.619.677	2.512.253.142	2.775.816.775
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224.197.408	370.822.821	354.566.542	395.168.514
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747	105.290.677	100.232.189	115.325.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.559.038	12.668.781	14.797.502	13.652.447
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.025.861	9.742.870	9.827.999	17.082.855
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.037.730	243.120.491	229.708.852	249.108.212
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.573.615.108	1.624.715.625	1.679.025.419	1.792.676.497
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.275.933	50.852.354	46.839.153	47.289.153
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586	1.271.590.067	1.237.967.327	1.268.916.510
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589	302.273.202	394.218.939	476.470.834
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.792.113	585.081.231	478.661.181	585.721.764
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	942.739	4.580.000	2.250.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	143.325.208	171.067.103	152.560.887	152.560.887
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	73.600.480	46.337.071	-	112.220.284
1.3.7	Dana Desa	243.866.425	311.087.446	321.520.294	320.940.593
2	BELANJA	2.282.330.771	2.482.125.690	2.656.503.142	2.960.816.775
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.780.715.488	1.963.456.168	1.846.597.441	1.557.893.662
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884	1.032.184.118	1.161.909.785	1.058.370.563
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055	48.124.969	55.987.450	24.943.283
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425	1.149.725	2.485.200	2.485.200
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321	9.970.076	11.395.502	12.897.744
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747	625.433.403	611.819.504	456.196.871
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	-	3.000.000	3.000.000

Kode	Uraian	Realisasi		Asumsi 2018**)	Proyeksi 2019
		2016	2017 *)		
2.2	BELANJA LANGSUNG	501.615.283	765.263.396	809.905.701	1.402.923.112
2.2.1	Belanja Pegawai	27.421.377	60.119.848	77.712.564	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.434.818	339.944.350	414.653.337	
2.2.3	Belanja Modal	220.759.087	365.199.198	317.539.798	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.726.140)	99.156.928	(144.250.000)	(185.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	406.262.095	375.166.439	155.250.000	200.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	406.198.863	375.166.439	155.250.000	200.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.231	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.304.000	18.200.000	11.000.000	15.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000	13.200.000	3.000.000	5.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	397.958.095	356.966.439	144.250.000	185.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	374.231.954	456.123.367	0	0

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang merupakan implementasi tahun ke empat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021. Penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2019 juga mengacu pada sasaran pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam program kegiatan Perangkat Daerah yang diharapkan mampu mendukung target pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

Perumusan prioritas pembangunan didasarkan pada identifikasi permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah sebagai dasar operasional dari tujuan strategis daerah yang didasarkan pada aspek pertimbangan kebutuhan serta daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat dan cakupan pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya, capaian kinerja yang direncanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang sebagai dasar penjabaran program kegiatan yang disertai tolok ukur kinerja yang jelas serta kerangka pendanaan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi Kabupaten Klaten ke depan dapat berkembang dan membawa ke keadaan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.
- ✓ **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah Kabupaten Klaten mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan tetap memperhatikan kerja sama dengan pihak lain.
- ✓ **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah Kabupaten Klaten dapat mewujudkan kemampuan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan untuk



memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.

Sehingga secara utuh makna tersebut adalah menuju Kabupaten Klaten yang mampu untuk menciptakan nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Klaten dan mewujudkan Klaten yang maju dalam peradaban, mandiri secara ekonomi, dan berdaya saing untuk menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) Misi pembangunan daerah, yang kemudian dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang terjabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya

Tujuan :

1. Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Sasaran :

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya;

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun, meningkatkan budaya baca masyarakat, meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal, dan meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dan Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Tujuan :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;



2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Arah Kebijakan :

1. Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja, Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah, serta Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah.

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM;
3. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan;
4. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.



Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis agropolitan, Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah, Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan, serta Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani.
2. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, Pengembangan pusat promosi dan perdagangan, serta Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan, serta meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja.

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat;

Sasaran :

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
2. Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan pengelolaan persampahan, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
2. Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, utilitas



umum jalan, dan makam, Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan, Meningkatkan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi, Pengembangan sumber daya energi terbarukan, serta meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

Tujuan :

1. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran :

1. Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana;
3. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai, Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, serta Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry.
2. Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana, Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana, serta Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana.
3. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan, Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana, serta Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;

Tujuan : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila;

Sasaran :

1. Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat;
2. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda);



3. Terwujudnya akhlak yang mulia;
4. Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama;

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila, Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta Meningkatkan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai, Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat, serta Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan, serta Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan.
4. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan

Tujuan :

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan, Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan, serta Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.
2. Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 3. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, 4. Perlindungan khusus, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, serta Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.



8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Tujuan : Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas;

Sasaran :

1. Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
2. Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, serta Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial).
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Visi					
Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing					
Misi ke 1 :					
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya					
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1.1.1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun
				1.1.1.2	Meningkatkan budaya baca masyarakat
				1.1.2.1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal
				1.1.2.2	Meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan
2	Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	2.1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	2.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan
				2.1.1.2	Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat
3	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	3.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	3.1.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal

**Misi ke 2 :
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	1.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah.	1.1.1.1	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
				1.1.1.2	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
				1.1.2.1	Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur
		1.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa	1.2.1.1	Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja.
				1.2.2.1	Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal
				1.2.2.2	Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien
				1.2.3.1	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	2.1	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	2.1.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
				2.1.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah
				2.1.1.3	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah

**Misi ke 3 :
Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1.1	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	1.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis agropolitan
				1.1.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah
				1.1.1.3	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan
				1.1.1.4	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani
		1.2	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM	1.2.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal
				1.2.1.2	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
				1.2.1.3	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
				1.2.1.4	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat
		1.3	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	1.3.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan
				1.3.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan
		1.4	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	1.4.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
				1.4.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja

**Misi ke 4 :
Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Publik dan Penyediaan Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sosial Masyarakat**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat	1.1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	1.1.1.1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah.
				1.1.1.2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran).
				1.1.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah.
				1.1.2.2	Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran).
				1.1.3.1	Meningkatkan pengelolaan persampahan
				1.1.4.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
		1.2	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman	1.2.1.1	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
				1.2.2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan, makam
				1.2.2.2	Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan
				1.2.2.3	Meningkatkan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi
				1.2.2.4	Pengembangan sumber daya energi terbarukan
				1.2.3.1	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik

Misi ke 5 :					
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah					
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup	1.1	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	1.1.1.1	Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai
				1.1.1.2	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
				1.1.2.1	Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis <i>agro forestry</i>
				1.1.3.1	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
2	Mewujudkan pengurangan resiko bencana	2.1	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	2.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
				2.1.1.2	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
				2.1.1.3	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
		2.2	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	2.2.1.1	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan
				2.2.1.2	Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana
				2.2.1.3	Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana

**Misi ke 6 :
Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila	1.1	Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat	1.1.1.1	Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila
				1.1.1.2	Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
				1.1.1.3	Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
				1.1.1.4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				1.1.1.5	Meningkatkan perlindungan sosial
		1.2	Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda)	1.2.1.1	Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai
				1.2.1.2	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat
				1.2.1.3	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat
		1.3	Terwujudnya akhlak yang mulia	1.3.1.1	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan
				1.3.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan
		1.4	Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama	1.4.1.1	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama

**Misi ke 7 :
Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1.1	Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan	1.1.1.1	Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender
				1.1.1.2	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
				1.1.1.3	Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan
				1.1.2.1	Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan
				1.1.2.2	Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif
2	Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	2.1	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	2.1.1.1	Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 3. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, 4. Perlindungan khusus, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak
				2.1.2.1	Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak

Misi ke 8 : Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik					
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas	1.1	Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan
				1.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (<i>bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial</i>)
		1.2	Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat	1.2.1.1	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 difokuskan pada percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah yang menuju Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing. Selain itu prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dirumuskan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupaten Klaten.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang kemudian dirumuskan kedalam sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”. Implementasi kesembilan agenda prioritas tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan meliputi dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan yang didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran utama pembangunan nasional tahun 2018, yang meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8 %;
2. Laju Inflasi pada kisaran 2,5 – 4,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp.72.217 ribu;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5 %;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98; dan
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2 %.

Rencana pembangunan nasional tahun 2019 tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang dirumuskan ke dalam tema pembangunan nasional tahun 2019 yaitu “**Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas**” yang disusun melalui pendekatan proses perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, integratif dan spasial melalui penguatan kebijakan *money follow program* yang kemudian diprioritaskan pada :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
Kebijakan pada prioritas ini diarahkan pada :
 - a. Percepatan pengurangan kemiskinan;
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; dan
 - e. Peningkatan tata kelola layanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
Kebijakan pada prioritas ini, diarahkan pada :
 - a. Peningkatan konektivitas;
 - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika;
 - c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa;
 - d. Pembangunan daerah afirmasi; dan
 - e. Pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan.Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :
 - 1). Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
 - 2). Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
 - 3). Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
 - 4). Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
 - 5). Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal dan perdesaan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
Kebijakan pada prioritas ini, diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;

- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :

- 1). Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - 2). Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 - 3). Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 - 4). Peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
 - 5). Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

Kebijakan pada prioritas ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya yang dilakukan melalui pelestarian lingkungan, melalui:

- a. Peningkatan produksi energi primer;
- b. Peningkatan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Peningkatan aksesibilitas air;
- d. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. Pemantapan dan ketahanan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. Peningkatan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. Perkuatan distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
- h. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. Pemantapan pembangunan infrastruktur sumber daya air;



- j. Peningkatan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. Percepatan regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. Peningkatan kesadaran sumberdaya air

Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :

- 1). Pemenuhan kebutuhan energi
 - 2). Pemenuhan kebutuhan pangan
 - 3). Pemantapan ketahanan sumber daya air
 - 4). Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 5). Perencanaan pembangunan rendah karbon
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
- Kebijakan prioritas ini diarahkan pada :
- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - b. menjamin kesuksesan pemilu
 - c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - e. memperkuat efektivitas diplomasi

B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Mengingat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 masih berupa rancangan teknokratik, maka RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah secara substansi memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019 serta berpedoman RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Periode Tahap ke III, menjaga kesinambungan RPJMD Tahun 2013-2018 dan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang (antara lain rencana tata ruang dan wilayah, prinsip *Sustainable Development Goals/SDGs* Tahun 2016-2030 dan Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah).

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1. Penanggulangan kemiskinan;
- 2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- 3. Kualitas hidup dan daya saing SDM;
- 4. Pengelolaan sumber daya alam – lingkungan dan penanggulangan bencana;
- 5. Ketahanan pangan dan energi;



6. Kesenjangan wilayah;
7. Tata kelola pemerintahan .

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6 %;
- b. Inflasi sebesar 4 + 1%;
- c. PDRD/Kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 – 4,43%; dan
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 – 12,01%.

Selain hal tersebut diatas, dalam rangka mewujudkan kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah serta upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merumuskan kebijakan pembangunan kewilayahan, antara lain :

- 1). Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus upaya pengurangan kemiskinan mendasari basis data terpadu utamanya di 15 Kabupaten (Blora, Grobogan, Purworejo, Demak, Cilacap, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen dan Wonosobo).
- 2). Pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi serta rencana tata ruang wilayah, antara lain :
 - a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi :
 - Pengembangan kawasan agropolitan : Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas (Mangga Emas); Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar (Girisuka); Semarang, Boyolali, Magelang (Semar Boyong); Wonosobo, Banjarnegara (Sobo Banjar).
 - Kawasan Industri Terpadu : Rembang, Demak – Semarang – Kendal, Brebes, Cilacap, Kebumen.
 - Pengembangan Industri kerajinan berbasis potensi lokal.
 - b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
 - c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan.
 - e. Kawasan peruntukan wisata.
 - f. Pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah.

- 3). Keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional di Jawa Tengah.
- 4). Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diprioritaskan diantaranya pada :
 - a. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan percepatan pencapaian program strategis Provinsi/Nasional dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
 - b. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan serta perdesaan.
 - c. Peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan nasional/provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian, serta pengembangan sistem transportasi massal pada daerah perkotaan.
 - d. Pemenuhan dan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan layanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan sarana prasarana kesehatan lainnya.
 - e. Peningkatan daya tarik/amenitas di obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional.
 - f. Peningkatan ketahanan masyarakat desa.

C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun strategis untuk memacu ketercapaian pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Fokus pelaksanaan tahun keempat tersebut pada Tahapan Pemantapan (2018-2019) dengan 4 (empat) butir tujuan, antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitasi umum bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Mendasari pada butir-butir tujuan pembangunan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan isu strategis daerah, antara lain :

1. Kemiskinan dan Pengangguran;

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menjadi isu besar dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 pada kisaran 14,15% menurun dibandingkan Tahun 2016 yang berada pada kisaran 14,46%. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kecilnya penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor antara lain ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran), tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, sosial kultur masyarakat yang cenderung mewarisi kebiasaan hidup para leluhurnya, masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, serta adanya fluktuatifnya harga kelompok bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Penduduk yang termasuk kategori pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang karena belum mendapat pekerjaan atau memang penduduk yang tidak bekerja sama sekali karena beberapa faktor penyebab. Tingkat pengangguran di Kabupaten Klaten Tahun 2017 berada pada kisaran

4,75% mengalami kondisi stagnan dibanding Tahun 2016 yang juga berada pada kisaran 4,35%. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengangguran antara lain rendahnya kualitas angkatan kerja yang belum mampu bersaing di pasar kerja serta belum dimilikinya kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja mandiri.

2. Potensi Ekonomi Daerah;

Kabupaten Klaten memiliki potensi ekonomi daerah yang cukup besar meliputi bidang Pertanian/Perkebunan, Perdagangan, Pariwisata, Industri dan UKM serta Koperasi.

Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang cukup besar dan strategis, karena lebih dari 50% dari luas wilayah Kabupaten Klaten merupakan lahan pertanian produktif yang didukung sistem irigasi teknis dan sumber daya air yang memadai. Termasuk bidang perikanan, peternakan dan perkebunan juga memiliki potensi yang cukup menonjol. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala di dalam pembangunan pertanian seperti; masih rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, penerapan pola tanam yang belum tepat sesuai dengan ketentuan, keterbatasan infrastruktur pertanian, masih lemahnya SDM dan kelembagaan tani, masih adanya alih fungsi lahan pertanian, adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menurunnya kesuburan tanah, masih kurangnya penggunaan benih unggul yang bersertifikasi atau berlabel, rendahnya kualitas dan kuantitas produksi perikanan serta peternakan, belum berkembangnya potensi komoditas tanaman perkebunan.

Untuk sektor perdagangan potensi yang dimiliki antara lain pasar (tradisional dan modern), Pedagang Kaki Lima, Kuliner dan jasa lainnya. Meskipun memiliki potensi perdagangan yang cukup besar, namun demikian juga masih perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan serta ditata sesuai dengan kawasan peruntukannya, agar dapat lebih memiliki daya tarik dan daya saing serta mendukung peningkatan produktifitas ekonomi wilayah dan perkotaan.

Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor kepariwisataan, namun demikian sampai saat ini pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Klaten masih belum terintegrasi antar sektor dan wilayah, serta kurang memperhatikan aspek industri pariwisata, destinasi wisata, promosi/pemasaran pariwisata serta kelembagaan pariwisata. Sehingga mengakibatkan

pengembangan kepariwisataan daerah menjadi belum optimal dan masih belum memiliki daya tarik dan daya saing kepariwisataan.

Sektor industri (Industri Kecil Menengah) dan UKM juga memiliki potensi yang besar dan tersebar di 26 kecamatan. Saat ini pola yang dilakukan dalam pemberdayaan IKM dan UKM melalui pola pendekatan Klaster. Terdapat 11 Klaster yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati meliputi : Klaster Lurik, Batik, Konveksi, Logam, Mebel, Keramik, Makanan Olahan, Desa Wisata, Minapolitan, Lereng Merapi dan Handycraft.

Namun demikian potensi tersebut dalam implementasinya masih banyak ditemukan berbagai kendala, yaitu antara lain masih minimnya IKM dan UKM yang memiliki daya saing, masih lemahnya akses terhadap sumberdaya produktif (lahan, modal, pasar, informasi, teknologi dan bahan baku), dan masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan, serta belum berkembangnya usaha IKM dan UKM yang berbasis pada ekonomi kreatif.

Potensi dan perkembangan koperasi juga cukup besar yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Namun dalam perkembangannya koperasi yang tidak aktif masih cukup besar sekitar 30% - 40% termasuk masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kesehatan manajemen koperasi.

Pertumbuhan dan perkembangan di bidang investasi serta penanaman modal belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kebijakan yang pro investasi maupun peningkatan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

3. Infrastruktur dan Kesenjangan Antar Wilayah;

Pembangunan infrastruktur sangat menjadi faktor dominan dan strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah. Beberapa permasalahan pembangunan infrastruktur adalah :

- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana permukiman dan utilitas, seperti jalan dan jembatan, drainase, sanitasi, air minum, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum dan jaringan irigasi.

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan dan pengendalian tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya langkah strategis dan menyeluruh dalam menuju akses universal (100 persen akses air minum; 0 persen kawasan kumuh; 100 persen akses sanitasi)
- Masih perlu adanya dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kualitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah serta antar kewenangan.

4. Pendidikan dan Kesehatan;

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal mendasar dari tujuan pembangunan sehingga pendidikan dan kesehatan bisa dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital, karena menyangkut hal yang melekat pada diri manusia itu sendiri.

Urusan pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini juga merupakan bagian penting dalam rangka mendukung target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten.

Isu strategis yang ada pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana yang belum merata serta peran serta masyarakat dan Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh baik pendidikan formal, maupun pendidikan informal dan non formal yang berkarakter berbasis moral dan budi pekerti. Juga kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga masih sulit untuk mendirikan sekolah unggulan,

Sedangkan isu strategis ada urusan kesehatan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan masih banyaknya penduduk miskin yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Masih adanya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan serta pola hidup tak sehat dan pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Diharapkan penyelenggaraan urusan kesehatan ini dapat

meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Usia Harapan Hidup (UHH). Dan pemerataan tenaga ahli /profesi kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu.

5. Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

Sebagai langkah peningkatan pelayanan publik yang prima dan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung *roadmap* reformasi birokrasi perlu adanya komitmen bersama sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu dalam rangka menuju *good goverment* dan *good governance* perlu adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegras, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam;

Permasalahan pokok pada sektor lingkungan hidup antara lain belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah; pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup; kurangnya ruang terbuka hijau publik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Isu kebencanaan di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari faktor geografis yang terletak di lereng Gunung Merapi. Selain itu, secara geologis Kabupaten Klaten dilalui sesar aktif yang menimbulkan kerawanan gempa bumi. Kerawanan lain di Kabupaten Klaten seperti banjir, tanah longsor dan angin ribut. Untuk itu pengurangan resiko bencana merupakan aspek menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten.

7. Pangan dan Energi.

Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penyangga pangan tetap perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk dapat menuju kepada

kemandirian dan kedaulatan pangan. Sehingga diperlukan komitmen dan dukungan program yang mengarah pada ketahanan pangan, termasuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah lestari) dan pengembangan keanekaragaman pangan serta diversifikasi pangan. Dari sektor energi, perlu adanya peningkatan pemanfaatan energi alternatif, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi, serta optimalisasi pengelolaan energi terbarukan.

Mendasari analisa berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Klaten serta mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 diarahkan dalam rangka **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”** yang kemudian dituangkan ke dalam prioritas pembangunan daerah, antara lain :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran;
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi;
6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan.

Dengan mendasari permasalahan dan isu strategis tersebut, kebijakan pembangunan tahun 2019 diarahkan dalam penyusunan program/kegiatan dapat fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektoral yang mampu menyelesaikan permasalahan daerah serta berorientasi pada keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang terukur dengan tetap mempertimbangkan aspek peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder, meningkatkan keterpaduan proses perencanaan, mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Arah

kebijakan dan rumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 tersebut merupakan langkah-langkah dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2019 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada kisaran 5,4 – 5,5%;
- b. Tingkat Kemiskinan, yang diharapkan menurun pada kisaran 13,41%;
- c. Laju Inflasi, diproyeksikan pada kisaran 2,3 – 2,5%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diharapkan turun menjadi kisaran 4,13%; dan
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diharapkan mencapai angka sebesar 75,45.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 juga dilakukan dalam upaya mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Nasional Tahun 2019. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Nasional sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019

Kode PN	Prioritas Nasional	Kode PP	Prioritas Provinsi	Kode PD	Prioritas Kabupaten
PN01	Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	PP01	Penanggulangan kemiskinan	PD01	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran
PN02	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	PP02	Penguatan daya saing ekonomi daerah	PD02	Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi
PN03	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif	PP03	Kualitas hidup dan daya saing SDM	PD03	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
PN04	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	PP04	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	PD04	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
PN05	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	PP05	Ketahanan Pangan dan energi	PD05	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi
		PP06	Kesenjangan wilayah	PD06	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
		PP07	Tata kelola pemerintah	PD07	Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mendasari hasil evaluasi pembangunan daerah serta mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang disertai target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2016 juga mempertimbangkan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah serta mendasari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, serta 5 (lima) fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

5.1. RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Rencana program urusan pendidikan diarahkan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2019 antara lain : Angka harapan lama sekolah 9,20; Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,63; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 92,79, SD/MI/Setara sebesar 96,03, SMP/MTs/Setara sebesar 89,08; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Setara sebesar 83,10, SMP/MTs/Setara sebesar 65,44; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,01, SMP/MTs sebesar 0,05; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 96,67; Angka Kelulusan SD/MI sebesar 97,81, SMP/MTs sebesar 95,55. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Non Formal;
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan mendukung pencapaian Angka Usia Harapan Hidup sebesar 72,73; Prosentase Balita Gizi Buruk sebesar 0,72; Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) sebesar 12; Angka Kematian Bayi sebesar 11; Angka Kematian Balita 15,6. Pelaksanaan urusan kesehatan difokuskan untuk peningkatan pelayanan bidang kesehatan dengan dukungan program-program antara lain :



- a. Program Peningkatan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- l. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- m. Program Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan;
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- p. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; dan
- q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diprioritaskan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur daerah. Target yang diharapkan di tahun 2019 antara lain : Prosentase jalan dalam kondisi baik sebesar 60,97; Prosentase jembatan dalam kondisi baik 62,30; Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik sebesar 62,54; Prosentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 19,126; Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 93. Sedangkan jabaran program antara lain :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan;
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- h. Program Pengendalian Banjir;
- i. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan
- j. Program Perencanaan Tata Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran untuk meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pelaksanaan urusan ini diprioritaskan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur daerah. Target yang diharapkan di tahun 2019 antara lain : akses air minum 100 persen, sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak mencapai 100 persen, rasio luasan kawasan kumuh perkotaan 55.00, rasio cakupan elektrifikasi 98, persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan 10.50 dan persentase penanganan RTLH 23,41. Target-target tersebut dicapai melalui dukungan program seperti:

- a. Program Pengembangan Perumahan; dan
- b. Program Peningkatan Kualitas Pemukiman;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diarahkan pada sasaran untuk menekan angka kriminalitas 2.8, persentase penegakan peraturan daerah 91.75, cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada 401 desa/kelurahan, rasio tempat ibadah per satuan penduduk 29.36 dan peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama. Target di atas diterjemahkan dengan program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- g. Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
- h. Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran;

6. Sosial

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (CAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Keagamaan Peningkatan pelayanan kesehatan lansia; Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Penanganan Darurat Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam; Pembinaan panti asuhan /panti jompo dan Program Peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan, dengan capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 26 % dan persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani 83%;
- 2) Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada sasaran untuk mencapai Rasio Perempuan Korban Kekerasan 1.4, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 53.98%, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 82% dan Drop out akseptor KB 15. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

3. Pangan

Urusan Pangan mengarah pada sasaran untuk meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan, dengan indeks kecukupan pangan 91,55 dan skor pola pangan harapan 92,25. Target di atas diterjemahkan dengan program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

4. Pertanahan

Urusan Pertanahan diarahkan pada sasaran untuk terlaksananya penanganan/fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Klaten; terselenggaranya validasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Klaten, dan penurunan persentase alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah:

- a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- b. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya untuk menaikkan indeks kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan sasaran untuk peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
6. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan program pada urusan ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran sebanyak 138.310 lembar, Akte Pernikahan per tahun sebanyak 525 lembar dan jumlah Akte Kematian sebanyak 475 lembar.
2. Terlaksananya perekaman data biometric dan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebanyak 946,150 penduduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dan program pembangunan kawasan perdesaan.

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan program pada urusan ini adalah adanya kawasan desa mandiri pangan, kawasan desa minapolitan, kawasan desa ATP (agro teknopark), dan pengembangan kawasan desa wisata.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan

diarahkan untuk penurunan drop out akseptor KB sebanyak 0,95, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, persentase peserta KB aktif 78.22 dan penurunan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Program Pelayanan kontrasepsi;
4. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
5. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
6. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan
8. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

9. Perhubungan

Pembangunan di bidang urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan angka tingkat keselamatan lalu lintas. Target tersebut diterjemahkan dengan program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; dan
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

10. Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, dan Program Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat, Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media surat kabar dan media elektronik (radio dan televisi);
- 2) Tersebarinya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website pemerintah.
- 3) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 35 sistem informasi untuk memberikan kemudahan akses dan data.
- 4) Terlaksananya penanganan pelayanan seluruh pengaduan masyarakat
- 5) Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2019 antara lain: peningkatan UMKM yang memiliki daya saing, Jumlah promosi produk unggulan daerah (pameran) sebanyak 6 pameran, adanya Jumlah produk unggulan wilayah di seluruh wilayah kecamatan dan persentase koperasi aktif 69.77%. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
4. Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah.

12. Penanaman Modal

Urusan ini diorientasikan untuk mencapai target jumlah investor berskala nasional PMDN sebanyak 25, jumlah investor berskala nasional PMA sebanyak 5 investor, pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan, dan SOP layanan perijinan selama 14 hari.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Penanaman Modal adalah:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini diorientasikan untuk mencapai target kecamatan yang mempunyai sarana, dan gedung olahraga yang representatif di 26 kecamatan, persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi



secara teratur mencapai 91.43 persen dan persentase cabang olahraga yang memperoleh medali dalam kompetisi nasional sebanyak 17.24 persen dan pengembangan sarana prasana keolahragaan. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah

1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan;
2. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
5. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

14. Statistik

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan statistik sebagai berikut :

- 1) Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA);
- 2) Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita;
- 3) Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat

15. Persandian

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat. Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ini adalah adanya sebanyak 36 Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

16. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diorientasikan untuk target jumlah kerjasama antar daerah terkait kebudayaan sebanyak 33 kerjasama, jumlah jenis kesenian sebanyak 39, pagelaran seni dan budaya tradisional sebanyak

13, dan pelestarian budaya daerah sebanyak 4 jenis budaya. Selanjutnya, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah

- a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- c. Program Pengembangan Nilai Budaya.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perpustakaan adalah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ini adalah peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 10.000 pengunjung dan jumlah koleksi buku perpustakaan per tahun 150 buku.

18. Kearsipan

Program Kearsipan diarahkan pada jumlah koleksi arsip sebanyak 7500 koleksi, peningkatan jumlah pengunjung arsip, jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar sebanyak 16 desa. Selanjutnya, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan kearsipan adalah

- a. Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Program Kelautan dan Perikanan diarahkan peningkatan produksi ikan perikanan darat sebanyak 43.129 ton, produksi benih ikan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR) sebanyak 127 juta ekor, peningkatan produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI), cakupan bina Kelompok Pembudidaya Ikan pada 308 Pokdakan, dan tingkat konsumsi ikan 19.61 kg/kapita/tahun. Selanjutnya, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Pengembangan budidaya perikanan
- b. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- c. Pengembangan perikanan tangkap

2. Pariwisata

Program Pariwisata diarahkan jumlah kawasan wisata unggulan sebanyak 2 kawasan, pengembangan desa wisata, jumlah obyek wisata 25, jumlah kunjungan wisata sebanyak 293,041 pengunjung dan pengembangan jumlah homestay 20 unit. Selanjutnya, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan ini adalah:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Kemitraan

3. Pertanian

Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pertanian adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebanyak 12,20, capaian indeks kecukupan pangan 91,55 dan skor Pola Pangan Harapan 92,25. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah:

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
- b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- c. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- e. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- f. Peningkatan produksi hasil peternakan;
- g. Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- h. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; dan
- i. Pengembangan kawasan agropolitan.

4. Kehutanan

Urusan kehutanan diorientasikan pada target persentase kerusakan hutan dan lahan kritis sebanyak 15,50%, peningkatan jumlah penangkar burung menjadi 325 penangkar, dan pemeliharaan penghijauan pada 50 hektar. Adapun, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan ini adalah:

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diorientasikan pada target Rasio cakupan elektrifikasi 98, pembinaan dan pengawasan

pertambangan. Adapun, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan ini adalah:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

6. Perdagangan

Urusan Perdagangan diorientasikan pada target capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 19,12 persen, jumlah pasar yang direvitalisasi 2 pasar per tahun, rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang sebanyak 0,72, persentase produk barang dan jasa yang aman mencapai 95 persen dan persentase pendapatan pasar terhadap PAD 1,56 persen. Adapun, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan ini adalah:

- a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- c. Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan.

7. Perindustrian

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ini adalah

- 1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 35.2 persen
- 2) Jumlah Industri Menengah dan Besar 132 unit usaha
- 3) Jumlah produk yang memiliki ISO dan SNI 65 produk
- 4) Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur 76 unit usaha
- 5) Jumlah IKM mebel yang memiliki SVLK 331 pengrajin.

8. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah Program Pengembangan wilayah transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan transmigrasi sebagai berikut:



- 1) Terlaksananya penempatan 30 KK transmigran swakarsa sebagai perwujudan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- 2) Meningkatnya keterampilan calon transmigran yang siap untuk bertransmigrasi.

D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan urusan bidang administrasi pemerintahan difokuskan pada program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain mengarah pada perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dukungan program antara lain :

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- d. Program penataan peraturan perundang-undangan;
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan;
- f. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
- h. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Program penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM;
- j. Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan;
- k. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
- l. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan;
- m. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan;
- n. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- o. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan



2. Pengawasan

Fokus program pada urusan bidang pengawasan diarahkan untuk mencapai indikator program antara lain tingkat maturitas SPIP mencapai level 3; tingkat kapabilitas APIP mencapai level 3; cakupan keselarasan kebijakan dengan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

3. Perencanaan

Program prioritas pada urusan bidang perencanaan diharapkan mampu mendukung pencapaian prosentase konsistensi perencanaan sebesar 83%; cakupan ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu serta tersusunnya dokumen evaluasi pembangunan daerah. Program pada urusan ini antara lain :

- a. Program perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- c. Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
- d. Program perencanaan pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah; dan
- e. Program pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

4. Keuangan

Indikasi program pada urusan bidang keuangan mendukung capaian yaitu meningkatkan opini BPK terhadap LKPD; ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu, prosentase optimalisasi pendapatan daerah, prosentase pengelolaan aset dan keuangan, dan prosentase penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Program pada urusan bidang ini adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

5. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Fokus program urusan bidang kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan Profesionalitas ASN sebesar 87%. Dukungan kegiatan diarahkan pada pengelolaan/manajemen kepegawaian daerah antara lain analisa jabatan dan analisa beban

kerja perangkat daerah, cakupan peningkatan pengembangan budaya kerja melalui Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan dan pengembangan Aparatur.

6. Penelitian dan Pengembangan

Program dalam penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan diharapkan mampu meningkatkan prosentase inovasi daerah yang tercipta serta prosentase penerapan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembangan. Program pada urusan bidang ini adalah Program penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan pula program yang bersifat pendukung operasional, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Daftar rencana program dan kegiatan dijabarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran.

5.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan analisis keuangan daerah pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan program-program yang menjadi rencana kerja tahun 2019 sebagaimana pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan Rencana Kerja Tahun 2019

Kode	Uraian	Proyeksi 2019
1	PENDAPATAN	2.775.816.775.604
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	395.168.514.500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.325.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.652.447.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.082.855.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	249.108.212.500
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.792.676.497.104
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	47.289.153.000
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.268.916.510.000

Kode	Uraian	Proyeksi 2019
1.2.3	Dana Transfer Khusus	476.470.834.104
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	585.721.764.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.250.000.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	152.560.887.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	112.220.284.000
1.3.7	Dana Desa	320.940.593.000
2	BELANJA	2.960.816.775.604
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.557.893.662.820
2.1.1	Belanja Pegawai	1.058.370.563.620
2.1.4	Belanja Hibah	24.943.283.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	12.897.744.700
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	456.196.871.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.402.923.112.784
SURPLUS / (DEFISIT)		(185.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		185.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja pemerintah daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 yang terbagi beberapa aspek, maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk target tahun 2019 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Penunjang Urusan Pemerintahan				
	1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5.42	
	1.2	Laju Inflasi	%	3.15	
	1.3	PDRB Per kapita	ribu rupiah	23.560.000	
	1.4	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	%	87,59	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pendidikan				Dinas Pendidikan
	1.1	Angka melek huruf	Angka	99.73	
	1.2	Angka harapan lama sekolah	Angka	9.20	
	1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	62.88	
	1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Setara	Angka	95.46	
	1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara	Angka	88.50	
	1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Setara	Angka	83.5	
	1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara	Angka	65.9	
2	Kesehatan				Dinas Kesehatan
	2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	996	
	2.2	Angka usia harapan hidup	Angka	72,73	
	2.3	Persentase balita gizi buruk	%	0,72	
	2.4	Angka kematian ibu melahirkan	Angka	12	

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Ketenagakerjaan				
	3.1	Rasio penduduk yang bekerja	Angka	0,65	Disperinaker
Aspek Pelayanan Umum					
Fokus Layanan Urusan Wajib					
I. Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan				Dinas Pendidikan
	1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.02	
	1.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.1	
	1.3	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.7	
	1.4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97.5	
	1.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	
	1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96.63	
	1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	0.23	
	1.8	Rasio guru/murid	Angka	1:14	
	1.9	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Angka	1:09	
	1.10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	69.1	
	1.11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	91.4	
	1.12	Jumlah anak umur 3-6 tahun yang mengikuti program TK/RA	Anak	35.697	
	1.13	Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	Orang	1.421	
	1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,02	
2	Kesehatan				Dinas Kesehatan
	2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	7.97	
	2.2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0.86	
	2.3	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	7.64	
	2.4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	31.42	
	2.5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83	
	2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	
	2.7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	
	2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	
	2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	
	2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	
	2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	96	
	2.14	Cakupan Puskesmas	%	100	
	2.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	100	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Dinas PU & PR
	3.1	Tingkat pelayanan infrastruktur	Angka	69,8	
	3.2	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	60,97	
	3.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	62,30	
	3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	62,54	
	3.5	Luasan irigasi dalam kondisi baik	Ha	19.126	
	3.6	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	Angka	0,07	
	3.7	Persentase pengoperasian TPA	%	36	
	3.8	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Angka	29,36	
	3.9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Angka	199,79	
	3.10	Panjang jalan dilalui Roda 4	Km	769,63	
	3.11	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	Ruas	2,171,028	
	3.12	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	469,27	
	3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan	Ruas	417	
	3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan	Km	409	
	3.15	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	40,15	
	3.16	Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	M	554	
	3.17	Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan	%	24	
	3.18	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	5,7	
	3.19	Jumlah dokumen rencana tata ruang	dok	2	
	3.20	Penerapan dan pengembangan sistem informasi geografis	sistem	1	
	3.21	Prosentase Trotoar di kawasan perkotaan dalam kondisi baik	%	68,97	
	3.22	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	93	

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4.1	Rasio rumah layak huni	Angka	89,10	
	4.2	Persentase air minum layak	%	100	
	4.3	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	100	
	4.4	Rumah tangga pengguna listrik	RT	394.655	
	4.5	Persentase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%	55,00	
	4.6	Cakupan elektrifikasi	%	98	
	4.7	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	15,00	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				Kesbangpol Satpol PP
	5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	100	
	5.2	Kegiatan pembinaan Politik daerah	Kegiatan	4	
	5.3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Angka	0,4	
	5.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Orang	83,58	
	5.5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Angka	2,49	
	5.6	Penegakan PERDA	%	91,75	
	5.7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Desa	401	
	5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	91,75	
	5.9	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Angka	12.49	
	5.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Desa	401	
	5.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Angka	2,4	
	5.12	Jumlah LSM	%	58	
	5.13	Jumlah Ormas	Angka	16	
	5.14	Angka Kriminalitas	%	2,8	
	5.15	Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman, ketertiban yang direspon kurang dari satu jam setelah laporan/informasi diterima	%	100	
6	Sosial				Dinas Sosial, P3KB
	6.1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	1,1	

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	44,78	
	6.3	Persentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	77	
	6.4	Desa tangguh bencana	desa	3	
	6.5	Indeks Resiko bencana	kategori	sedang	
	6.6	Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	75	
II. Non Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja				Disperinaker
	1.1	Angka partisipasi angkatan kerja	Angka	70	
	1.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Angka	99	
	1.3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	26	
	1.4	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	4,13	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Dinas Sosial, P3KB
	2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,98	
	2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	82	
	2.3	Rasio KDRT (Perempuan korban kekerasan)	Angka	1,97	
	2.4	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,9	
	2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99	
	2.6	Cakupan lembaga yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Lembaga	21	
	2.7	Indeks kualitas hidup anak	Angka	92,45	
3	Pangan				Dinas Pertan, Ket. Pangan & Perikanan
	3.1	Regulasi ketahanan pangan	buah	1	
	3.2	Tingkat kecukupan pangan	%	1,5	
	3.3	Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai)	ton	239.376 83.988 5.741	
4	Pertanahan				
	4.1	Penyelesaian izin lokasi	Angka	100	
	4.2	Persentase luas lahan bersertifikat	%	87,44	
	4.3	Penyelesaian kasus tanah negara	Angka	1	
5	Lingkungan Hidup				Dinas LH & Kehutanan
	5.1	Persentase penanganan sampah	%	36	
	5.2	Kondisi sungai dalam keadaan baik	%	36	
	5.4	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	lokasi	5	
	5.5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100	



No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.6	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	Angka	0,07	
	5.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	60,61	
	5.8	Status udara	Angka	82,31	
	5.9	Status air	Angka	51,1	
	5.10	Lahan tutupan	Angka	51,22	
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				Dinas Dukcapil
	6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	96,18	
	6.2	Jumlah bayi berakte kelahiran	Lembar	138.31	
	6.3	Jml Akte Pernikahan per tahun	Lembar	525	
	6.4	Kepemilikan KTP	Angka	884.65	
	6.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	0,0669	
	6.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Jenis	E KTP	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Dinas Permasdes
	7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	unit	50	
	7.2	Jumlah BUMDes	lembaga	25	
	7.3	PKK aktif	lembaga	428	
	7.4	Posyandu aktif	lembaga	2250	
	7.5	Kemiskinan	orang	133.057	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Dinas Sosial, P3KB
	8.1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	%	1	
	8.2	Persentase peserta KB aktif	%	78,22	
	8.3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	kelompok	30	
9	Perhubungan				Dinas Perhubungan
	9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	1.881.247	
	9.2	Rasio ijin trayek	Angka	0,000229	
	9.3	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	unit	12.558	
	9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	unit	9	
	9.5	Rasio Angkutan darat	Angka	0,0315	
	9.6	Cakupan Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,84	
	9.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	
	9.8	Pemasangan Rambu-rambu	%	33,38	
10	Komunikasi dan Informatika				Dinas Kominfo
	10.1	Jumlah tower seluler	unit	232	
	10.2	Sistim Informasi Manajemen Pemda	jenis	35	
	10.3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	kegiatan	12	
	10.4	Prosentase penanganan pelayanan masyarakat	%	100	



No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Dinas Dagkop & UKM
	11.1	Persentase koperasi aktif	%	78	
	11.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	kelompok	16.23	
	11.3	Pertumbuhan UMKM	kelompok	55.066	
	11.4	Usaha Mikro dan Kecil	kelompok	50.086	
12	Penanaman Modal				Dinas Pen. dan Modal PTSP
	12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Kelompok	25	
	12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dlm jutaan Rupiah)	Rp.	114.215	
	12.3	PMA (US\$)	\$	88.281.003	
	12.4	Rasio daya serap tenaga kerja	Angka	2,5	
13	Pemuda dan Olahraga				Dinas Parbudpora
	13.1	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	26	
	13.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	kelompok	4	
	13.3	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat nasional	%	17,24	
	13.4	Persentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana olahraga	%	100	
14	Statistik				Dinas Kominfo
	14.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Buku	1	
15	Kebudayaan				Dinas Parbudpora
	15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	13	
	15.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	1	
	15.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	8	
	15.4	Jumlah museum/taman budaya	unit	1	
16	Perpustakaan				Dinas Arsipus
	16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	10.000	
	16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	43.811	
17	Arsip				Dinas Arsipus
	17.1	Jumlah arsip	unit	101.2	
18	Penunjang Urusan Pem.				
	18.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	80	
	18.2	Survei Kepuasan Masyarakat	%	72,25	
	18.3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,38	
	18.4	Tingkat Maturitas SPIP pada Level Tiga	\$	85	
	18.5	Tingkat kapabilitas APIP berada pada Level Tiga	%	85	
Fokus Layanan Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan				Dinas Pertan, Ket. Pangan & Perikanan
	1.1	Produksi perikanan	ton	431.29	
	1.2	Konsumsi ikan	%	19,16	

No	Aspek/Fokus /Urusan Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pariwisata				Dinas Parbudpora
	2.1	Kunjungan wisata	orang	644.7	
	2.2	Persentase kenaikan kunjungan wisnu/man	%	1	
3	Pertanian				Dinas Pertan, Ket. Pangan & Perikanan
	3.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	64	
	3.2	Produktifitas jagung	ton	85,18	
	3.3	Produktifitas kedelai	ton	22,26	
	3.4	Produksi telur ayam ras	ton	9,456	
	3.5	Produksi telur ayam buras	ton	1.471	
	3.6	Jumlah Pemetongan ternak sapi di RPH	%	5.32	
4	Kehutanan				Dinas Pertan, Ket. Pangan & Perikanan
	4.1	Luas lahan penghijauan baru	Ha	250	
	4.2	Pemeliharaan penghijauan	%	50	
5	Perdagangan				Dinas Dagkop & UKM
	5.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	21,63	
	5.2	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0,72	
	5.3	Jumlah PKL dan asongan	kelompok	1686	
6	Perindustrian				Dinas Perinaker
	6.1	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	35,61	
	6.2	Pertumbuhan Industri.	%	18,88	
	6.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	kelompok	37.148	
7	Transmigrasi				Dinas Perinaker
		Transmigrasi Swakarsa	KK	30	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Perhubungan				Dinas Perhubungan
	1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,002452	
	1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/barang	1.881.247	
	1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang/barang	1.394.353	
2	Penataan Ruang				Dinas PU & PR
	2.1	Luas wilayah banjir	Ha	6.808	
	2.2	Luas wilayah kekeringan	Ha	26.803	
3	Penunjang Urusan Pemerintah				
	3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Angka	99	
	3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jenis	2	
4	Pariwisata				Dinas Parbudpora
	4.1	Jumlah rumah makan	Unit	347	
	4.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jenis	51	